

**PEMBERIAN NAFKAH TERHADAP ANAK HASIL DARI
PERKAWINAN *SIRRI*
(Studi Kasus Di Desa Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten
Kebumen)**

SKRIPSI



Oleh :
Dwi Fifi Feranti
NIM. 132111011

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**

**PEMBERIAN NAFKAH TERHADAP ANAK HASIL DARI
PERKAWINAN *SIRRI*
(Studi Kasus Di Desa Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten
Kebumen)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Sata Satu
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh :
Dwi Fifi Feranti
NIM. 132111011

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka kampus III Ngaliyan
Telp. (024) 7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Dwi Fifi Feranti

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami mengirimkan skripsi saudara:

Nama : Dwi Fifi Feranti
NIM : 132111011
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Judul : **PEMBERIAN NAFKAH TERHADAP ANAK
HASIL DARI PERKAWINAN SIRRI (Studi Kasus
Di Desa Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten
Kebumen)**


Dengan ini, kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 9 November 2017

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D
NIP. 19590606 198903 1 002


Dr. Hj. Naili Anafah, S.H.I., M.Ag.
NIP. 19810622 200604 2 022



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka kampus III Ngaliyan
Telp. (024) 7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Dwi Fifi Feranti

NIM/Jurusan : 132111011/ Ahwal Al-Syakhsyiah


Judul : **"PEMBERIAN NAFKAH TERHADAP ANAK HASIL DARI PERKAWINAN SIRRI (Studi Kasus Di Desa Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen)"**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 29 Desember 2017 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Tahun akademik 2016/2017.

Semarang, 17 Januari 2018

Ketua Sidang/Penguji

Sekretaris Sidang/Penguji


Yunita Dewi Septiana, M.A


Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D

NIP: 197606272005012003

NIP: 195906061989031022

Penguji Utama I

Penguji Utama II


Supangat, M.Ag.


Mithin Lathifah, M.Ag.

NIP: 197104022005011004

NIP: 197511072001122002

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D


Dr. Hj. Naili Anafah, S. H.I., M.Ag.

NIP: 195906061989031022

NIP: 198106222006042022



MOTTO

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ
لَهُ بِوَلَدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

Artinya: " Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian ...¹

¹ QS. Al-Baqarah [2]:233, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penerjema/Penafsir Al-Qur'an:1971), hlm.57

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya ini teruntuk mereka

Ayahanda tercinta (Darsono) yang telah bersama-Nya, yang telah mengantarkan ke depan pintu perkuliahan namun tidak dapat menemani dalam mencapai ke tahap ini. Ibunda tercinta (Haryati) yang dengan sepenuh hati mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis dan tidak henti-hentinya mendukung penulis baik materiil maupun immaterial.

(Allahummaghir lahuma...)

Keluarga yang selalu memberi semangat, kakakku ‘*Kak Ros*’ (Eka Fitriyati, A.Md), kakak ipar (Iwan Nugroho), Adikku ‘*Si Gembul*’ (Tri Laela Wulandari), ‘*Si Cantik*’ (Dila Catur Febriyanti), dan ‘*Si Bontot*’

(Alinda Fatiqa Putri).

Sahabat terkasih ‘*tedy sayang*’ Heri Setiono, S.Pd,

Sahabat pejuang Sarjana Strata Satu yang selalu memberi warna di kehidupan rantau ‘*baeeku sayang*’ Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, SH., ‘*paijo*’ Vina Idammatussilmi, ‘*amel cubby*’ Maelina, S.Sos., ‘*kakak*’

Zhuhro Uliffani, SH., ‘*apitku*’ Miftahul Jannah, SH., ‘*bungsu*’ Khoerunnisa, SH., ‘*EYang*’ Tria Nufita Ayuni, S.Pd., Muhammad Hasan

Syafe’I, SH., *Love soo much*.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 November 2017



Deklarator

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dwi Fifi Feranti".

Dwi Fifi Feranti
NIM:132111011

ABSTRAK

Pemenuhan nafkah merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi orang tua akibat dari suatu perkawinan. Perkawinan tersebut adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan para pelaku perkawinan *sirri* bahwa perkawinan yang dilakukan secara agama atau perkawinan yang tidak dicatatkan di kantor urusan agama, menyebabkan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak wajib atau tidak berhak atas nafkah dari ayah biologisnya. Berangkat dari fenomena yang terjadi di masyarakat yang penyusun teliti, penyusun tertarik untuk membahas bagaimana kedudukan anak yang terlahir dari perkawinan *sirri* dan pemberian nafkah terhadap anak tersebut serta alasan-alasan yang melatarbekangi pemberian nafkah terhadap anak. Skripsi ini bertujuan guna mengetahui bagaimana kedudukan anak yang terlahir dari perkawinan *sirri* serta pendapat hukum Islam dan hukum Positif terkait alasan-alasan pemberian nafkah terhadap anak hasil dari perkawinan *sirri*.

Skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang didasarkan pada obyek lapangan di daerah atau lokasi tertentu guna mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Penelitian ini juga tergolong dalam penelitian sosiologis (*socio legal research*). Pengumpulan dan penyusunan data dilakukan dengan cara wawancara, dan dokumentasi dari berbagai sumber primer dan sumber sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah dengan metode deskriptif-analitis.

Perkawinan *sirri* yang terjadi di masyarakat saat ini adalah pernikahan yang tidak dilakukan dihadapan petugas pencatat nikah (PPN) dan tidak dicatatkan di kantor urusan agama (KUA) dan kantor catatan sipil (CAPIL). Anak yang dilahirkan akibat perkawinan *sirri* di dalam Undang-Undang Perkawinan menyebutkan secara tegas bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Kemudian terhadap kewajiban hak nafkah di dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233 menjelaskan bahwa kewajiban pemenuhan nafkah adalah dilakukan oleh seorang ayah, apabila seorang ayah tidak dapat melaksanakan kewajiban tersebut dapat dilakukan oleh kerabatnya.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, hidayah serta taufiq-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh gelar kesarjanaan dari Fakultas Syari'at Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Shalawat ma'a salam, tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa risalah Islam yang penuh dengan pengetahuan, sehingga dapat menjadi bekal kita, baik di dunia maupun akherat.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan bantuan dalam bentuk apapun yang sangat besar artinya bagi penulis. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, Ph.D dan Ibu Dr. Hj. Naili Arafah, SHI., M.Ag selaku pembimbing I dan II, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan **Pembantu-pembantu** Dekan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menulis skripsi tersebut dan memberikan fasilitas untuk belajar dari awal hingga akhir.
3. Segenap Bapak dan Ibu Dosen beserta karyawan-karyawati di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan kepada penulis.

4. Kepala Desa Argopeni Kec.Kebumen Kab.Kebumen Bapak Suprpto beserta perangkatnya yang telah member izin dan membantu penulis dalam melaksanakan penelitian di Desa Argopeni Kec.Kebumen Kab.Kebumen.
5. Kepala KUA Kec. Kebumen Kab.Kebumen Bapak Muhammad dan Bapak Johan selaku pembimbing, serta staf-stafnya yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian di Desa Argopeni Kec.Kebumen Kab.Kebumen.
6. Ayahanda Darsono (Alm) yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil di masa hidupnya, Ibunda Haryati, Kakak Eka Fitriyati, A.Md., serta suami Iwan Nugroho, Adik Tri Laela Wulandari, Dila Catur Febriyanti, dan Alinda Fatiqa Putri beserta seluruh keluarga tercinta yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan baik moril maupun materiil serta do'a tulus guna kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Abah Kyai Dr. KH. Fadlolan Musyaffa' Mu'thi, Lc., MA selaku Pengasuh Ma'had Al-Jami'ah Walisongo Semarang beserta keluarga, jajaran pengurus serta dosen pengajar yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu disini, yang telah membimbing penulis pada satu tahun pertama saat menjadi mahasiswi UIN Walisongo Semarang.
8. Pejuang Sarjana Strata Satu yang belum dapat penulis tuangkan namanya dalam poin ini, namun Insyaa Allah selalu penulis lantunkan namanya di dalam do'a.

9. Sahabat terkasih Heri Setiono, S.Pd yang selalu berjuang bersama untuk satu tujuan yang mulia. Sahabat pejuang Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, SH., (*baeku sayang*), Vina Idamatussilmi (*paijo*), Maelina, S.Sos., (*amel cubby*), Zhuhro Uliffani, SH., (*kakak*), Miftahul Jannah, SH., (*apitku*), Khoerunnisa, SH., (*bungsuku*), Ranum Saputri, Mifta Rizkiana, Lailatul Hidayah, Muhammad Hasan Syafe'i, SH., Tria Nufita Ayuni, S.Pd., Ifatun Khoirunnisa, S.Pd., Alam Rezki, S.Pd., dan Ristiyanto, S.Pd., terimakasih karena telah sudi menemani dan memberikan tangis dan tawa bagi penulis selama hampir empat tahun 4 bulan lamanya di perantauan dengan segala tingkah yang penulis lakukan.
10. Penasehat, tutor, dan senior Kangmas Zainal Muttaqin, SH., dan Rifky Insani, SH., yang selalu siap sedia menasehati, mengarahkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Para pejuang Sarjana Hukum yang selama 4 tahun 4 bulan selalu menganggap penulis sebagai “Embok” dari keluarga besar Ahwal Al-Syakhsiiyyah-A 2013.
12. Teman-teman seperjuangan Ikatan Mahasiswa Kebumen (IMAKE) Rayon Walisongo Semarang TA 2013, 2014, 2015, Tim PPL TA 2015/2016, KKL TA 2016/2017, Generasi Baru Bank Indonesia (GENBI) TA 2016, HMJ-AS TA 2016/2017, dan Keluarga KKN MIT-3 TA 2016/2017 Posko 31 Desa Sadeng Kec.Gunung Pati Kab.Semarang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu di sini, namun kalian sungguh membawa banyak warna dan pelajaran serta pengalaman baru bagi penulis. *You are special.*

Semoga amal baik mereka diterima oleh Allah SWT, dan semoga mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik yang konstruktif dan saran inovatif dari pembaca sebagai bahan penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT. Tempat kembali, disertai harapan semoga skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan umat Islam dan memberikan manfaat bagi penulis khususnya serta para pembaca pada umumnya. Amin

Semarang, 27 November 2017

Penulis

Dwi Fifi Feranti
NIM: 132111011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
DEKLARASI	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
LAMPIRAN	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Metode Penelitian Skripsi	14
F. Sistematika Penulisan Skripsi	18
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN SIRRI, HAK DAN KEWAJIBAN NAFKAH ANAK AKIBAT PERKAWINAN SIRRI	
A. Perkawinan Sirri	21
B. Hak dan Kewajiban Nafkah	
1. Kedudukan Anak Hasil Dari Perkawinan Sirri	27
2. Nafkah	30
3. Hak dan Kewajiban Nafkah	33

	4. Faktor-Faktor Penghalang Wajib Nafkah	44
BAB III	: PEMBERIAN NAFKAH TERHADAP ANAK HASIL DARI PERKAWINAN SIRRI DI DESA ARGOPENI KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN	
	A. Gambaran Umum Desa Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	
	1. Keadaan Geografis	48
	2. Mata Pencarian Penduduk	50
	3. Pendidikan Masyarakat Desa	51
	4. Kondisi Keadaan Ekonomi	53
	B. Pemberian Nafkah Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Sirri Di Desa Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	
	1. Anak Hasil Dari Perkawinan Sirri Di Desa Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	54
	2. Pemberian Nafkah Anak Hasil Dari Perkawinan Sirri Di Desa Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	58
	C. Alasan Pemberian Nafkah Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Sirri Di Desa Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	69
BAB IV	: ANALISIS TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH ANAK HASIL DARI PERKAWINAN SIRRI	
	A. Analisis Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan <i>Sirri</i> Di Desa Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	

.....	73
B. Analisis Pendapat Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Alasan Pemberian Nafkah Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Sirri Di Desa Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	
1. Alasan Sebab Peawinan	83
2. Alasan Sebab Ekonomi	87
 BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	97
B. Saran-saran	100
C. Penutup	101
 DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

- I. Surat Keterangan dari Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAP3DA) Kabupaten Kebumen
- II. Surat Keterangan dari Desa Argopeni Kec.Kebumen Kab.Kebumen
- III. Surat Persetujuan Wawancara dengan Narasumber
- IV. Pedoman Wawancara dengan Objek Penelitian
- V. Daftar Riwayat Hidup

PEDOMAN TRANSLITERASI

Terdapat beberapa versi pada dasarnya mempunyai pola yang cukup banyak, berikut ini disajikan pola transliterasi arab latin berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

Konsonan:

Huruf	Nama	Penulisan
ا	<i>Alif</i>	‘
ب	<i>Ba</i>	B
ت	<i>Ta</i>	T
ث	<i>Tsa</i>	<u>S</u>
ج	<i>Jim</i>	J
ح	<i>Ha</i>	<u>H</u>
خ	<i>Kha</i>	kh
د	<i>Dal</i>	D
ذ	<i>Zal</i>	<u>Z</u>
ر	<i>Ra</i>	R
ز	<i>Zai</i>	Z
س	<i>Sin</i>	S
ش	<i>Syin</i>	Sy

ص	<i>Sad</i>	Sh
ض	<i>Dlod</i>	DI
ط	<i>Tho</i>	Th
ظ	<i>Zho</i>	Zh
ع	<i>'Ain</i>	‘
غ	<i>Gain</i>	Gh
ف	<i>Fa</i>	R
ق	<i>Qaf</i>	Q
ك	<i>Kaf</i>	K
ل	<i>Lam</i>	L
م	<i>Mim</i>	M
ن	<i>Nun</i>	N
و	<i>Waw</i>	W
هـ	<i>Ha</i>	H
ء	<i>Hamzah</i>	‘
ي	<i>Ya</i>	Y
ة	<i>Ta (marbutoh)</i>	<u>T</u>

Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong)

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

-

----- Fatha

----- Kasroh

-

و

----- Dlommah

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>au</i>	<i>a dan u</i>

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda:

Contoh:

Harkat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
اي	<i>Fatha dan alif atau ya</i>	<i>a</i>	a dan garis panjang diatas
اي	<i>Kasroh dan ya</i>	<i>i</i>	i dan garis diatas
او	<i>Dlommatain dan waw</i>	<i>u</i>	U dan garis diatas

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fatha, kasroh dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.

2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah/h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfal</i>
المدينة المنورة	al-Madinah al-munawwarah

Syaddad(Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

ربنا = *Robbana* نزل = *Nazzala*

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh:

	Pola Penulisan
--	-----------------------

التواب	<i>Al-tawwabu</i>	<i>At-tawwabu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf **Qomariah**

Kata sandang yang diikuti huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan- aturan diatas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البدیع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan : Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun maupun qomariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Apabila terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh:

تاخذون : *Ta'khuzuna*

الشهداء : *Asy-syuhada'u*

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il, isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka

penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh	Pola Penulisan
وان لها هو خير الرازقين	<i>Wa innalaha lahuwa khair al-raziqin</i>
فاو فوا الكيل والميزان	<i>Fa aufu al-kaila wa al-mizani</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri yang dibangun guna membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk keluarga *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah*. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum [30] ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantara rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-bena terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berfikir.”²

Dan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan seseorang.³ Namun dengan keanekaragaman kebudayaan yang dimiliki setiap masyarakat Indonesia membuat perubahan suatu aturan. Perubahan yang terjadi atau adanya suatu peraturan yang baru terkadang tidak dapat diterima langsung oleh masyarakat. Contohnya, suatu perkawinan haruslah

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB I Pasal 1.

² QS. Ar-Rum [30] : 21, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penerjema/Penafsir Al-Qur'an, 1971), hlm. 644

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB I Pasal 2 ayat (1).

dicatatkan. Dan akhir-akhir ini banyak sekali perkawinan yang tidak dicatatkan (perkawinan *sirri*) dengan berbagai alasan. Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah [2] ayat 235:

عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا
تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : “Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang makruf”⁴

Dari potongan ayat diatas menjelaskan bahwa *sirri* berasal dari

bahasa Arab سرا yang mempunyai arti rahasia. Sedangkan nikah atau kawin secara bahasa mempunyai arti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang didalam syariat dikenal dengan akad nikah.⁵

Pada awalnya pengertian nikah *sirri* itu ditujukan atau dimaknakan terhadap perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sebagaimana dikemukakan oleh Umar bin Khaththab, ketika beliau mendapat pengaduan perkara tentang perkawinan yang hanya disaksikan oleh seorang saksi laki-laki dan seorang saksi perempuan.⁶ Namun, saat ini, pengertian nikah *sirri* diperluas, yaitu termasuk perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan tetapi belum atau tidak dicatatkan

⁴ QS. Al-Baqarah [2]: 235, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjema/Penafsir Al-Qur'an, 1971), hlm. 57

⁵ Wahbah Az-Zuhli, *Fiqh Islam Wa Adilatuhi* Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 39

⁶ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 345

di KUA kecamatan setempat bagi orang yang beragama Islam. Perkawinan *sirri* sering kali disebut sebagai perkawinan rahasia atau biasa disebut dengan pernikahan dibawah tangan, karena seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa perkawinan *sirri* perkawinan yang dilakukan di depan seorang wali dan dua orang saksi, namun tidak dilakukan di hadapan Petugas Pegawai Nikah sebagai aparat resmi pemerintah, atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama untuk seorang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil untuk yang beragama non Islam. Dalam hal perkawinan *sirri* yang dilakukan oleh kaum muslim, perkawinan semacam ini dirasa sudah sah karena telah memenuhi unsur-unsur perkawinan dalam Islam, yang mana meliputi dua orang mempelai, dua orang saksi, wali, dan ijab-qabul.⁷

Bahwa pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) di atas, kebanyakan masyarakat saat ini lebih memilih melakukan perkawinan *sirri* yang lebih menghemat biaya dan juga waktu, sebab masyarakat merasakan untuk melakukan perkawinan sebagaimana mestinya harus mendaftarkan dirinya ke Kantor Urusan Agama dan, atau Kantor Catatan Sipil dan harus melalui berbagai proses untuk melakukan perkawinan tersebut. Namun tidak hanya sebab faktor prosedur perkawinan menurut peraturan yang berlaku di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sesuai dengan prosedur adat masing-masing daerah , perkawinan *sirri* juga terkadang disebabkan karena sebab seorang laki-laki yang ingin

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Ilam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 55

melakukan poligami namun tidak mendapat persetujuan dari istri sahnya, dan untuk menutupi suatu perzinahan yang dilakukan anak dibawah umur yang mana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), menjelaskan bahwa perkawinan dapat dilakukan apabila mempelai laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sedang untuk mempelai perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Sehingga, ada beberapa masyarakat lebih memilih melakukan perkawinan *sirri* karena sebab di atas.

Nafkah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah belanja dalam hidup, atau dalam bahasa keseharian adalah nafkah yang berupa uang yang diberikan oleh suami atau ayah dari pendapatannya sehari-hari hasil dari bekerja untuk istri serta anak-anaknya guna bekal atau memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ahli-ahli fiqh menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan adanya pemberian nafkah adalah karena adanya suatu akad nikah, yang menimbulkan suatu ikatan kerabat atau hubungan kekeluargaan antara penerima nafkah dan pemberi nafkah. Dalam hal ini adalah pemberian nafkah terhadap anak oleh seorang ayah. Terdapat beberapa ketentuan dalam memberikan nafkah:⁸

1. Adanya hubungan kekeluargaan;
2. Anak memang membutuhkan nafkah;
3. Anak belum mampu mencari nafkah;

⁸ Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 81

4. Yang diwajibkan memberi nafkah (ayah) hendaklah kaya atau mampu.

Dalam pemberian nafkah yang diwajibkan oleh ayah, jikalau ayah tidak sanggup dalam pemenuhan nafkah untuk anaknya diwajibkan untuknya berusaha dalam pemenuhan nafkah yang dibebankan kepadanya. Karena anak adalah sebahagian dari padanya dan dihubungkan dengan dia. Apabila ayah benar-benar tidak mampu dalam pemenuhan nafkah terhadap anaknya, maka yang wajib memberi nafkah untuk anaknya adalah ibu, nenek dan saudaranya untuk menggantikan ayah memenuhi nafkah terhadap anaknya. Allah berfirman dalam Surah Ath-Thalaq [65] ayat 7:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا



Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa adanya tanggung jawab kepala keluarga kepada anggota keluarganya, yaitu istri dan anak-anaknya, untuk menafkahi mereka. Hal itu berarti bahwa salah satu pengeluaran harta untuk menafkahi keluarganya.

Merawat dan mendidik anak merupakan kewajiban bagi kedua orang tua, karena apabila anak yang masih dibawah umur belum *mumayyiz*

⁹ QS. Ath-Thlmaq [65] ayat 7, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjema/Peafsir Al-Qur'an, 1971), hlm. 946

tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan, bahkan dapat mengancam perkembangan jiwa mereka. Oleh karena itu, anak-anak tersebut wajib dipelihara, dirawat dan dididik dengan baik. Pengasuhan atau pemeliharaan atas anak meliputi beberapa aspek, yaitu pendidikan, biaya hidup, kesehatan, ketentraman, dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya.¹⁰

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak-anak mereka kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut pula tetap berlaku meskipun perkawinan kedua orang tua telah putus atau bercerai.¹¹ Seorang anak yang belum mampu berdiri sendiri atau dapat dikatakan belum dewasa dalam Kompilasi Hukum Islam dikatakan batas usia anak adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan, orang tua berkewajiban mewakili anak tersebut dalam segala hal perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan.¹² Dari pasal tersebut mengisyaratkan bahwa kewajiban orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali dengan ilmu pengetahuan untuk menjadi bekal mereka di dewasanya. Secara khusus Al-Qur'an menganjurkan kepada ibu agar menyusui anak-anaknya secara sempurna (sampai usia dua tahun).

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB X Pasal 45 Ayat 1 dan 2.

¹² Kompilasi Hukum Islam, Bab XIV Pasal 98.

Namun, Al-Qur'an juga mengisyaratkan kepada ayah atau ibu supaya melaksanakan kewajibannya berdasarkan kemampuannya dan tidak menginginkan ayah atau ibunya menderita karena anaknya. Bahwa segala biaya pemeliharaan untuk seorang anak adalah tanggung jawab seorang ayah.¹³

Adapun dalil yang menjadikan dasar tentang kewajiban merawat dan mendidik seorang anak, adalah firman Allah dalam Surah Al-Baqarah [2] ayat 233:

﴿وَالْوَالِدَتُ يُرَضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا فَإِنْ سَأَلْتُمْ مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “ Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingi menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh oranglain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut

¹³ Kompilasi Hukum Islam, Bab XIV Pasal 105.

*yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*¹⁴

Dari ayat dijelaskan bahwa pengasuhan dan pemberian nafkah dilakukan oleh orang tua dari seorang anak, dari ia lahir sampai anak mencapai *mumayiz*. Pada prinsipnya pemberian nafkah hukumnya adalah wajib, karena anak yang terpelihara akan mengalami masa depan yang tidak pasti jika kewajiban pengasuhan dan pemberian nafkah diabaikan oleh individu atau masyarakat. Kewajiban dari memelihara, mengasuh, mendidik dan memenuhi kebutuhan anak, adalah dalam tanggung orang tua sebagai upaya menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan dan pertumbuhan fisik dan psikologi anak.

Tanggung jawab pemberian nafkah terhadap istri dan anak-anak adalah ayah sepenuhnya, apabila seorang laki-laki telah mengucapkan akad untuk seorang perempuan, harus semestinya seorang laki-laki berkewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa tanggung jawab atas biaya pemeliharaan ditanggung oleh seorang ayah. Namun tidak semua istri dan anak-anak dari perkawinan *sirri* ini mendapatkan nafkah secara wajar dari suaminya seperti perkawinan sah pada umumnya, bahkan terkadang seorang suami dari perkawinan *sirri* karena sebab tertentu tidak memberikan hak nafkahnya, hal tersebut disebabkan karena perkawinan yang dilakukan

¹⁴ QS. Al-Baqarah [2]:233, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjema/Penafsir Al-Qur'an, 1971), hlm. 57

merupakan perkawinan *sirri* atau perawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan bawah tangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mencoba meniti, **“PEMBERIAN NAFKAH TERHADAP ANAK HASIL DARI PERKAWINAN *SIRRI* (Studi Kasus di Desa Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Bertolak dari alasan judul atau latar belakang dan batasan serta definisi operasional yang telah penulis uraikan di atas, maka ada permasalahan yang harus terjawab dan dibahas melalui penelitian ini. Adapun masalah yang dimaksud adalah:

1. Bagaimana anak hasil dari perkawinan *sirri* di Desa Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen ?
2. Bagaimana pendapat Hukum Islam dan Hukum Positif tentang pemberian nafkah terhadap anak hasil dari perkawinan *sirri* serta alasan-alasan pemberian nafkah di Desa Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada latar belakang serta rumusan masalah yang telah penulis uraikan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui kedudukan anak hasil dari perkawinan *sirri* di kalangan masyarakat terkhusus di Desa Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.
2. Mengetahui pendapat Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia tentang pemberian nafkah terhadap anak hasil dari perkawinan *sirri* serta alasan-alasan yang melatarbelakangi pemberian nafkah di Desa Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

D. TELAAH PUSTAKA

Untuk memastikan bahwa penelitian ini bukanlah penelitian yang sebelumnya pernah diteliti oleh orang lain, namun hanya ada beberapa penelitian yang memiliki alur permasalahan berbeda, antara lain:

Pertama, skripsi yang berjudul “Hilangnya Hak-Hak Anak dan Istri Akibat Nikah *Sirri* Studi Lapangan Di Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng”, yang ditulis oleh Muh.Rizki Prasetya dari Program Studi Peradilan Agama Fakultas Hukum Dan Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.¹⁵ Skripsi tersebut merupakan penelitian yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Dalam skripsi tersebut penulis membahas bagaimana sebab-akibat dari pernikahan *sirri* serta apa saja hak-hak yang dimiliki anak dan istri akibat nikah *sirri*. Dari skripsi tersebut mempunyai kesimpulan bahwa akibat dari hilangnya hak-hak anak dan istri akibat nikah istri adalah berasal dari

¹⁵ Muh.Rizki Prasetya, “*Hilangnya Hak-Hak Anak dan Istri Akibat Nikah Sirri*”, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010).

faktor pendidikan. Pendidikan disini yang menyebabkan ketidaktahuan masyarakat akan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang jelas didalamnya mengatur adanya peraturan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil. Dan akibat terjadinya perkawinan *sirri* dalam skripsi tersebut adalah hilangnya hak-hak anak seperti tanda pengenal (Akta Kelahiran).

Kedua, skripsi yang berjudul “Kedudukan Anak Hasil Kawin *Sirri* Menurut Hukum Positif Indonesia”, yang ditulis oleh Eko Santoso dari Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya.¹⁶ Skripsi tersebut merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan *statue approach* dan *conceptual approach* (melalui peraturan perundang-undangan dan mengkaji suatu studi kasus yang terjadi di masyarakat. Dalam skripsi ini membahas bagaimana terjadinya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedudukan anak akibat pernikahan *sirri* ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan juga bagaimana kejelasan kedudukan anak akibat pernikahan *sirri* menurut hukum positif Indonesia. Skripsi tersebut mempunyai kesimpulan bahwa kedudukan anak akibat nikah *sirri* sama dengan kedudukan anak hasil perkawinan sah lainnya, sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan (DNA) yang membuktikan anak dan bapak mempunyai hubungan secara hukum.

¹⁶ Eko Santoso, “*Kedudukan Anak Hasil Kawin Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia*”, Skripsi, (Surabaya: Universitas Wijaya Putra, 2012).

Ketiga, tesis yang berjudul “Akibat Hukum Perkawina *Sirri* (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Kekayaan Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan” yang ditulis oleh Abdullah Wasian dari Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.¹⁷ Tesis tersebut merupakan penelitian deskriptif analitis yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Dalam tesis tersebut membahas pernikahan *sirri* pada umumnya, dan bagaimana kedudukan anak, istri dan harta kekayaannya. Dengan kesimpulan bahwa secara Hukum Islam mengakui anak dan istri akibat dari pernikahan *sirri* namun secara Hukum Positif tidak mengakui adanya anak dan istri karena pernikahan yang dilakukan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil untuk yang beragama non Islam, dan juga anak dari pernikahan *sirri* tidak dapat melakukan hubungan hukum keperdataan dengan ayah biologisnya.

Dari beberapa skripsi atau tesis diatas yang digunakan penulis guna telaah pustaka, perbedaan penelitian-penelitian yang tedahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis lebih membahas bagaimana anak hasil dari perkawinan *sirri* dan bagaimana pendapat hukum Islam dan hukum positif tentang alasan-alasan pemberian nafkah anak hasil dari perkawinan *sirri* tersebut. Sedang penelitian-penelitian yang telah disebutkan diatas lebih membahas bagaimana hak dan kedudukan anak akibat perkawinan *sirri*.

¹⁷ Abdullah Wasian, “Akibat Hukum Perkawinan *Sirri* (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan”, Tesis, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010).

E. METODOLOGI PENELITIAN

Metode merupakan rumusan cara-cara tertentu agar sistematis untuk menanggapi sesuatu, dimaksudkan agar suatu hasil karya ilmiah (penelitian) tersebut dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah, dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Adapun dalam menyelesaikan skripsi ini penyusun akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang didasarkan pada obyek lapangan di daerah atau lokasi tertentu guna mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.¹⁸

Penelitian ini juga tergolong ke dalam penelitian hukum sosiologis (*socio legal research*), merupakan penelitian yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial atau mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹⁹ Penelitian ini menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam keitannya dengan hukum. Penelitian yang bersifat *socio legal* memandang hukum dari luar sebagai gejala sosial semata-mata dan mengaitkannya dengan masalah-masalah sosial. Dalam

¹⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian Bidang*, (Jakarta: PT Bumi Aksara. Cet. 11, 2010), hlm. 46.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 42

penelitian ini juga yang diteliti adalah bagaimana kondisi hukum secara intristik, yaitu hukum sebagai sistem nilai dan hukum norma sosial.

2. Sumber Data

Adapun sumber data atau dari mana data berasal, dalam studi ini diperoleh:

a. Sumber Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁰ Dalam penelitian ini adalah keterangan dari wawancara dengan antara lain:

- 1) Masyarakat yang melakukan perkawinan *sirri* di Desa Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.
- 2) Tokoh masyarakat atau sesepuh dan tokoh agama di Desa Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.
- 3) Kepala desa di Desa Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu. Menurut pendapat yang lain, data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkan untuk digunakan sebagai pendukung data primer.²¹ Pada umumnya, data sekunder ini

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, Cet. 3, 1986), hlm. 12.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 129.

sebagai penunjang data primer.

3. Teknik pengumpulan data

Pemilihan teknik pengumpulan data yang akan digunakan menyesuaikan dan mempertimbangkan obyek studi. Apabila penelitian berbentuk kasus-kasus maka pengumpulan data dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Metode wawancara (*interview*) adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden.²² Untuk wawancara ini penulis memilih jenis wawancara terarah dan terfokus dengan tujuan mendapatkan data yang sebanyak-banyaknya dan terjamin validitas datanya. Wawancara dilakukan dengan warga masyarakat Desa Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen yang melakukan perkawinan *sirri*. Dalam hal pelaksanaan wawancara dilakukan terhadap pelaku perkawinan *sirri* dan dilaksanakan ditempat tempat tertutup, karena berkenaan dengan permasalahan pribadi suatu keluarga. Dan penulis akan mewawancarai beberapa orang yang melakukan perkawinan *sirri* di Desa argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

Selain melakukan wawancara terhadap pelaku perkawinan

¹⁷ Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990), hlm. 129.

sirri, penulis juga melakukan wawancara terhadap tokoh masyarakat yang mengetahui tentang pemahaman perkawinan *sirri*, tokoh agama dan perangkat desa yang lebih tahu tentang perkawinan *sirri* yang terjadi di Desa Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, sehingga penulis mendapatkan informasi yang cukup mengenai perkawinan *sirri* yang terjadi di desa tersebut, dan alasan-alasan terjadinya perkawinan *sirri*. Diadakannya wawancara ini guna mendapatkan data tentang pandangan masyarakat mengenai perkawinan *sirri* dan data ini untuk memperkuat teknik pengumpulan data.

b. Metode Dokumentasi

Yaitu cara memperoleh dengan menelusuri dan mempelajari dokumen, catatan, buku-buku, peraturan perundang-undangan.²³ Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data atau dokumen yang dapat memberikan penjelasan tentang pemahaman tentang perkawinan *sirri* dan implikasinya.

4. Metode Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul maka penulis memakai metode deskriptif analitik. Kerja dari metode deskriptif analitik adalah dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 202.

memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan.²⁴ Metode deskriptif analisis juga metode yang menjelaskan suatu obyek permasalahan secara sistematis, memberikan analisa secara cermat, lugas, kritis, luas dan mendalam terhadap obyek kajian.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I : PENDAHULUAN

Di dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN SIRRI, HAK DAN KEWAJIBAN NAFKAH AKIBAT PERKAWINAN SIRRI

Dalam bab ini penulis menuangkan penjelasan umum tentang perkawinan *sirri* menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, akibat hukum terjadinya perkawinan *sirri*. Selain hal tersebut, penulis juga menuangkan penjelasan mengenai nafkah anak, faktor-faktor yang melandasai pemberian nafkah, hak dan kewajiban nafkah, serta kedudukan anak akibat perkawinan *sirri*.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 51.

Bab III : PEMBERIAN NAFKAH TERHADAP ANAK HASIL DARI PERKAWINAN SIRRI DI DESA ARGOPENI KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN

Pada bab ini memuat tentang keadaan geografis desa yang dijadikan objek penelitian, mata pencaharian masyarakat desa tersebut, latar belakang pendidikan, serta kondisi perekonomian masyarakat Desa Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

Dalam bab ini, penulis juga menjelaskan anak dari hasil perkawinan *sirri* serta menyajikan data bagaimana kedudukan anak hasil dari perkawinan *sirri*, serta pemberian nafkah terhadap anak hasil dari perkawinan *sirri* yang terjadi di Desa Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

Bab IV : ANALISI PENDAPAT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PEMBERIAN NAFKAH TERHADAP ANAK HASIL DARI PERKAWINAN SIRRI DI DESA ARGOPENI KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN

Dalam bab ini penulis memaparkan mengenai analisis terhadap kedudukan anak hasil dari perkawinan *sirri*, serta analisis pendapat hukum Islam dan hukum positif terhadap pemberian nafkah terhadap anak hasil dari

perkawinan sirri yang terjadi di Desa Argopeni
Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

Bab V : PENUTUP

Pada bab terakhir ini akan dipaparkan kesimpulan dari
analisis di atas, dilanjutkan dengan saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN *SIRRI* , HAK DAN KEWAJIBAN NAFKAH AKIBAT PERKAWINAN *SIRRI*

A. Perkawinan Sirri

Pernikahan atau perkawinan secara bahasa mempunyai arti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang didalam syariat dikenal dengan akad nikah.¹ Akad nikah yang telah ditetapkan oleh syariat adalah untuk memberikan hak kepemilikan keseluruhan terhadap isteri. Dalam suatu perkawinan, Allah SWT memberikan ketenangan dan kesenangan, karena keduanya dapat saling mengisi kebutuhan masing-masing, seperti firman Allah dalam Surah Ar-Ruum [30] ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”²

Ayat diatas menjelaskan bahwa perkawinan bukan hanya sekedar

bersatunya laki-laki dan perempuan, melainkan didalamnya unsur kasih sayang, rasa tentram, dan rasa senang bahkan perkembangan manusia.

Seperti tujuan dari perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk

¹ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhmi, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* Jilid 9,(Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 39.

² QS. Ar-Rum [30] : 21, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjema/Penafsir Al-Qur'an:1971), hlm. 644.

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*³, *mawaddah* dan *rahmah*.⁴ Perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami isteri yang dibangun guna membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Sedangkan menurut hukum Islam, perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW yang dilakukan dengan akad yang sangat kuat, perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah.⁶ dan melaksanakannya merupakan ibadah, Allah berfirman QS.An-Nuur [24] ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁷

Ayat diatas menjelaskan anjuran untuk seseorang yang sudah siap untuk segera melakukan perkawinan. Dan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

³ *Sakinah* ialah kedamaian, ketentraman, ketenangan serta kebahagiaan yang terjalin dalam kehidupan berumah tangga.

⁴ *Mawaddah wa rahmah*, ialah cinta dan kasih sayang, saling melengkapi serta melindungi.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB I Pasal 1.

⁶ Kompilasi Hukum Islam, Bab II Pasal 2-3.

⁷ QS. An-Nuur [24]:32 *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjema/Penafsir Al-Qur'an, 1971), hlm. 549.

kepercayaan seseorang.⁸ Secara syariat Islam, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Menurut Hukum Islam rukun perkawinan terdiri dari lima pokok yang harus dipenuhi yaitu, wali, calon mempelai, dua orang saksi, ijab dan qabul, dan mahar.⁹ Sehingga menurut hukum Islam apabila suatu perkawinan telah memenuhi lima pokok yang telah disebutkan diatas, perkawinan tersebut dapat dikatakan sah menurut hukum Islam. Dari situlah mayoritas masyarakat Indonesia yang masih banyak melakukan perkawinan yang dilakukan secara agama tanpa mengingat Indonesia adalah negara hukum, dan tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah sesuai hukum Indonesia.

Perkawinan *sirri* atau perkawinan yang tidak dicatat atau yang biasa disebut dengan perkawinan dibawah tangan, pada umumnya perkawinan yang hanya dihadiri oleh wali dan dua orang saksi, yang saksi-saksi tersebut tidak boleh mengumumkannya kepada khalayak ramai atau masyarakat. Menurut Imam Syafi'I perkawinan *sirri* adalah perawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yang dilaksanakan tanpa wali dan saksi. Namun pengertian *sirri* mempunyai pengertian yang beragam, dalam konteks ke Indonesiaan, perkawinan *sirri* identik dengan pengertian sebuah pengertian yang lazim dilaksanakan oleh masyarakat muslim, dengan melaksanakan syarat dan rukun perkawinan (calon mempelai, wali, dua orang saksi, maskawin dan ijab qabul) namun tidak dicatatkan dalam

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB I Pasal 2 ayat (1).

⁹ Bahrudin Muhammad, *Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan (Studi Hasil Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010)*, (Semarang: Fatama Publishing,2002), hlm. 49.

buku registrasi di Kantor Urusan Agama.¹⁰ Sedang menurut ulama' madzhab Malikiyah dan sebagian dari ulama' madzhab Hanabilah, menyatakan bahwa perkawinan *sirri* hukumnya tidak sah, dalam hal tersebut ulama Malikiyah mengharuskan suaminya untuk segera menceraikan isterinya, atau mebatalkan perkawinan tersebut, bahkan mereka menyatakan wajib ditegakkan *hadd* kepada kedua mempelai jika terbukti sudah melakukan hubungan badan. Begitu juga dengan kedua saksi wajib diberikan sanksi jika memang sengaja untuk merahasiakan perkawinan kedua mempelai tersebut.¹¹

Kata *Sirri* dalam kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir berasal dari kata *assirru* yang mempunyai arti "rahasia". (Munawwir:625) Sedangkan perkawinan *sirri* menurut perspektif fiqh, perkawinan *sirri* adalah perkawinan yang dilaksanakan tanpa menghadirkan wali dan atau dua orang saksi.¹² Namun pengertian diatas tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan hadis Nabi yang mengharuskan adanya seorang wali dan dua orang wali dalam suatu akad nikah. Dengan hal tersebut pengertian perkawinan *sirri* menurut pespektif fiqh dengan perspektif masyarakat sangatlah berbeda, karena menurut masyarakat sendiri perkawinan *sirri* adalah perkawinan yang dilakukan di bawah tangan atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk

¹⁰ *Ibid*, hlm. 48.

¹¹ *Ibid*, hlm. 49.

¹² M Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 210.

masyarakat muslim dan Kantor Catatan Sipil untuk masyarakat yang non-muslim di kecamatan setempat.

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

Pasal 5 ayat 1

Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.¹³

Bahwa pencatatan nikah bertujuan mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat Islam. Ini adalah suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan menjaga kesucian (*mitsaqan ghalidan*) perkawinan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi peselisihan atau percekcoakan diantara mereka, atau salah satunya bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing.¹⁴

Saat ini, pengertian perkawinan *sirri* tidak hanya menyangkut tidak dicatatnya suatu perkawinan, namun diketahui atau tidaknya suatu perkawinan oleh masyarakat banyak. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad dalam bukunya, nikah *sirri* atau nikah dibawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan di dalam ruangan terbatas dan tidak dilakukan

¹³ Kompilasi Hukum Islam BAB II Pasal 5 ayat (1)

¹⁴ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 45.

pencatatan maupun pengawasan oleh petugas KUA sehingga tidak mendapatkan akta nikah sebagai bukti suatu perkawinan.¹⁵

Beberapa pengertian diatas menunjukkan bahwa perkawinan *sirri* atau nikah dibawah tangan merupakan perkawinan yang dinyatakan sah menurut ketentuan agama Islam setelah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, yaitu adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan, adanya wali, dihadiri dua orang saksi, dan adanya ijab qabul. Namun pernikahan ini tidak dicatatkan dan diawasi oleh petugas atau pejabat yang berwenang.

Dengan demikian, nikah *sirri* yang hanya berdasarkan ketentuan agama tanpa dicatat dan diawasi oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh negara, yang pada dasarnya tidak mempunyai kekuatan hukum formal. Sehingga perkawinan tersebut banyak menimbulkan masalah bagi perempuan yang menjalaninya. Berbagai masalah yang muncul sebagai akibat dari perkawinan *sirri* seperti, suami yang dengan mudah melakukan poligami, tidak terpenuhinya nafkah untuk isteri dan anak-anaknya, laki-laki dapat dengan mudah menyangkal dari anak yang telah dilahirkan dengan perempuan yang dinikahi secara *sirri*, jika terjadi perceraian penyelesaian harta bersama menjadi tidak jelas.

¹⁵ Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKis, 2001), hlm. 74.

B. Hak dan Kewajiban Nafkah

1. Kedudukan Anak Hasil Dari Perkawinan *Sirri*

Perkawinan selain sebagai sarana pemenuhan naluriah kemanusiaan dan sebagai sarana pelaksanaan ibadah, juga untuk mendapatkan keturunan sebagai wujud kasih sayang dan penerus hidup dan kehidupan setiap manusia. Dan juga anak mempunyai kedudukan yang penting dalam suatu keluarga dan rumah tangga. Anak adalah amanah yang diberikan Allah SWT kepada umat-Nya yang harus dijaga dan dilindungi. Sebagai amanah yang diberikan Allah SWT, orang tua lah yang wajib memenuhi segala kewajiban tersebut. Anak merupakan manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun.¹⁶

Istilah anak sering kali disebut dalam Al-Qur'an dengan kata *al-walad* atau bentuk jamaknya *al-awlad* yang berarti anak yang dilahirkan dari orang tuanya, laki-laki ataupun perempuan, besar atau kecil, tunggal maupun banyak.¹⁷ Anak juga pada hakekatnya adalah seorang yang berada pada masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa seiring dengan pertambahan usia. Dalam hal ini seorang anak sangatlah memerlukan bantuan, bimbingan dan pengarahan dari orang tuanya atau orang yang lebih dewasa.

¹⁶ Bahrudin Muhammad, *Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan (Studi Hasil Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010)*, (Semarang: Fatama Publishing, 2002), hlm. 65.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 66.

Kelahiran anak merupakan peristiwa hukum dengan resminya seorang anak menjadi anggota keluarga melalui garis *nasab*, sehingga secara hukum anak berhak atas hubungan hukum tersebut. Hubungan hukum tersebut terdapat beberapa hak-hak anak yang harus ditunaikan orang tuanya seperti hak nafkah, waris, wali dan sebagainya juga dengan nasab pula dijamin hak orang tua terhadap anaknya.

Kedudukan anak dalam Islam adalah sebagai amanah Allah SWT dan tidak bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa diberlakukana sekehendak hati oleh orang tuanya. Sebagai amanah yang diberikan oleh Allah SWT orang tua wajib mengasuh dan menjaganya sebaik mungkin. Sebagai amanah yang diberi Allah SWT kepada orang tua, anak memiliki hak yang harus diakui dan diyakini. Menurut hukum Islam, terdapat beberapa macam-macam kedudukan/status anak, sesuai dengan sumber asal-usul anak itu sendiri. Sumber asal itulah yang akan menentuka kedudukan status seorang anak. Adapun kedudukan/status anak dalam hukum Islam adalah anak kandung, anak angkat, anak susu, anak pungut, anak tiri, dan anak diluar nikah. Masing-masing anak tersebut diatas, mendapat perhatian khusus dalam syariat Islam yang menentukan

kedudukan/statusnya, baik dalam keturunan dan kewarisan, maupun perwalian.¹⁸

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010, status anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan ayah dan keluarga ayahnya. Atas dasar putusan tersebut, maka ayah dan keluarga ayahnya wajib memberikan nafkah tersebut terhadap anak tersebut.¹⁹ Dalam putusan diatas, kewajiban tersebut merupakan kewajiban hukum memberi nafkah kepada anak, sebab anak yang diahirkkan dari hubungan biologis tanpa ikatan perkawinan yang sah, secara kodrati tidak berbeda dengan anak sah. Dengan demikian terhadap anak, ayah wajib menunaikan nafkah dan penghidupan yang layak seperti nafkah, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya kepada anak-anaknya sesuai dengan penghasilannya.

2. Nafkah

Nafkah dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah (n) 1. belanja untuk hidup; (uang) pendapatan; 2. Bekal hidup sehari-hari;

¹⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazdhab*. Dikutip dari Bahrudin Muhammad, *Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan (Studi Hasil Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010)*, (Semarang: Fatama Publishing ,2002), hlm.139.

¹⁹ Yang dimaksud nafkah dalam hlm ini adalah nafkah anak, berupa biaya pemeliharaan, biaya kebutuhan pokok anak, biaya pendidikan anak dan segala biaya yang diperlukan untuk menunjang kelangsungan dan perkembangan anak sampai dewasa dan mandiri, sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam.

rezeki; (n) bayaran, bonus, gaji, honor, imbalan, komisi, mata pencaharian, pemdapatan, penghasilan, perolehan, rezeki, upah; 3. Makan, dapur, penghidupan, perut, sambungan hidup. Sedangkan menurut Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya Nafkah menurut bahasa artinya ‘sesuatu yang diinfakkan oleh seseorang untuk keluarganya,’ sedangkan menurut syara’ nafkah adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal.²⁰

Yang dimaksud nafkah dalam hal ini adalah nafkah anak, berupa biaya pemeliharaan, biaya kebutuhan pokok anak, biaya pendidikan anak, dan segala biaya yang diperlukan untuk menunjang kelangsungan dan perkembangan anak sampai dewasa atau mandiri, sesuai Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.²¹ dengan kata lain nafkah adalah segala kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain.²²

Ahli-ahli fiqh menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan adanya pemberian nafkah adalah karena adanya suatu akad nikah, yang menimbulkan suatu ikatan kerabat atau hubungan antara anak atau isteri sebagai penerima nafkah dan

²⁰ Wahbah A-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Addilatuhu Jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 110.

²¹ Dina Khomsiana.A.F, *Akibat Hukum Istilhaq Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017) , hlm.70.

²² Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2008), hlm. 443.

suami atau ayah sebagai pemberi nafkah. Dalam hal ini penulis membahas pemberian nafkah terhadap anak oleh seorang ayah.

Terdapat ketentuan pemberian nafkah, meliputi: ²³

- a Adanya hubungan kekeluargaan;
- b Anak memang membutuhkan nafkah;
- c Anak belum mampu mencari nafkah;
- d Yang diwajibkan memberi nafkah (ayah) hendaknya kaya atau mampu.

Secara umum pemenuhan hak nafkah untuk seorang anak akibat suatu perkawinan adalah tanggung jawab seorang suami atau ayah sang anak, namun apabila seorang suami atau ayah tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban nafkah terhadap anak, maka tanggung jawab tersebut ditanggung oleh pihak keluarga yang mampu di bawah sebuah akad perkawinan.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah [2] ayat 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ
لَهُ بِوَلَدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

Artinya: " Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga

²³ Zakariya Ahmad Al Bahrry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 81.

*seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian ...*²⁴

Potongan ayat Al-Qur'an diatas telah jelas bahwa kewajiban dari seorang ayah adalah memberikan segala kebutuhan yang diperlukan oleh seorang anak dan juga para ibunya. Apabila dia tidak mampu dalam pemberian nafkah tersebut dapat dilakukan oleh kerabatnya. Dan ayat tersebut juga menjelaskan bahwa apabila seorang ibu tidak mampu dalam hal persusuan, dapat dilakukan oleh orang lain yang tepat dan diberikannya bayaran yang sepatutnya.

3. Hak dan Kewajiban Nafkah Akibat Perkawinan *Sirri*

Menurut jumhur ulama suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan, diantaranya wali. Sebagai seorang muslim sekaligus warga negara yang baik, kita wajib menaati *ulil amri* yang diantaranya telah dibuat Undang-Undang Tentang Perkawinan yang secara tegas didalamnya terdapat aturan agar suatu perkawinan haruslah dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kita sebagai warga negara yang taat akan hukum yang berlaku, itu berarti suatu bentuk ketaatan kita terhadap *ulil amri*. Firman Allah dalam Surah An-Nisa [4] ayat 59:

²⁴ QS. Al-Baqarah [2]:233, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjema/Penafsir Al-Qur'an, 1971), hlm. 57.

يَتَّبِعُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى
 الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ
 كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*²⁵

Ayat diatas menjelaskan bahwa konsep ketaatan terhadap undang-undang merupakan produk *ulil amri* yang bersifat mutlak, yang mana tergantung isi dari suatu pasal yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan juga hadits. Apabila suatu peraturan yang dibuat oleh *ulil amri* dan bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadits, maka tidak ada kewajiban kepada kita untuk menaati peraturan tersebut.

Sebagai umat muslim yang taat akan *ulil amri*, kita tidak hanya taat terhadap Undang-undang Perkawinan, namun juga terhadap Kompilasi Hukum Islam yang hadir sejak tahun 1990 berdasarkan intruksi Presiden RI. Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" di pasal tersebut memang tidak disebutkan bahwa suatu perkawinan harus dicatat, namun dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum

²⁵ QS. An-Nisa [4] ayat 59, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjema/Penafsir Al-Qur'an, 1971), hlm. 85.

Islam “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat” secara tegas dijelaskan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Oleh sebab itu, perkawinan wajib dicatat di lembaga resmi negara.

Dengan terjadinya perkawinan *sirri* yang saat ini marak dilakukan oleh masyarakat, yang mana telah dijelaskan diatas bahwa perkawinan *sirri* itu sendiri merupakan perkawinan yang tidak dicatatkan kepada lembaga yang berwenang, menimbulkan tidak diperolehnya akta perkawinan sebagai bukti bahwa telah terjadi suatu perkawinan, dari perkawinan yang tidak dicatatkan itu juga tersebut menimbulkan seorang perempuan dan anak tidak mendapat perlindungan hukum dan juga kewajiban yang harus diemban oleh seorang ayah atau suami hilang, karena perkawinan tersebut tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama setempat.

Dalam hal hubungan kekerabatan atau nasab dan berbagai hak yang timbul akibat dari perkawinan *sirri*, sebab suatu perkawinan yang sah menurut hukum Indonesia ataupun perkawinan *sirri* adalah ditetapkan nasab, dan hal tersebut dilakukan dengan adanya suatu perkawinan. Dan walaupun suatu perkawinan yang dilakukan adalah perkawinan *sirri* ataupun perkawinan yang sah menurut hukum Indonesia, dalam hal nasab

terhadap anak-anak yang dilahirkan dapat ditetapkan atau dinyatakan sebagai anak kandung dari ayah biologisnya.

Namun dalam hal perkawinan *sirri* atau perkawinan bawah tangan atau dapat disebut dengan perkawinan yang tidak dicatat, dari perkawinan ini menimbulkan beberapa akibat seperti yang telah dijelaskan diatas, terlebih untuk seorang anak, yang merupakan akibat dari suatu perkawinan tersebut tidak dapat menerima apa yang menjadi hak nya sebagai seorang anak, seperti tidak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya, hak waris, hak wali dan perlindungan hukum. Selain itu juga hak-hak diatas yang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang ayah atau suami tidak dijalankan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 45 ayat (1)

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Pasal diatas sangatlah jelas bahwa ayah wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka, dalam artian bahwa ayahlah yang berkewajiban memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh seorang anak sebelum masa dewasa (*baligh*) atau sebelum seorang anak dapat memenuhi segala kebutuhannya sendiri dan juga menikah.

Anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi warga negara yang beragama Islam dan Catatan Sipil untuk yang non Islam tidak berhak mendapatkan hak nafkah dari ayah biologisnya atau hanya bisa mempunyai hubungan nasab dengan ibunya, karena perkawinan tersebut menurut hukum positif Indonesia merupakan perkawinan yang tidak sah.²⁶

Sebagai titipan Allah kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara, anak memiliki hak yang harus diakui dan diyakini. Ketentuan tersebut ditegakan dalam Firman Allah AL-Qur'an Surah Al-Isra' [17] ayat 17:

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ
عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿١٧﴾

Artinya: “Dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah Kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Melihat dosa hamba-hamba-Nya”²⁷

Hak dalam Islam mempunyai dua makna yang *asasi*, yaitu *pertama*, dekumpulan akidah dan masih yang mengatur dasar-dasar yang harus ditaati dalam hubungan manusia sesame manusia, baik mengenai orang maupun mengenai harta. Dalam pengertian yang pertama ini. Hak sama dengan makna hukum. *Kedua*, kekuasaan

²⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB I Pasal 2.

²⁷ QS. Al- Isra [17]:17, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjema/Penafsir Al-Qur'an, 1971), hlm. 427.

menguasai sesuatu atau sesuatu wajib atas seseorang bagi lainnya. Hak menurut pengertian umum yaitu suatu ketentuan yang denganya *syara'* menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tuanya, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Dalam hal ini orang tua lah yang lebih berkewajiban atas terpenuhinya hak-hak yang seharusnya diterima oleh seorang anak. Diantara hak-hak yang seorang anak menurut hukum Islam dapat diuraikan sebagai berikut:²⁸

a) Ekonomi

Perekonomian rumah tangga muslim merupakan sekumpulan norma asasi yang berasal dari sumber-sumber hukum Islam yang dapat membentuk perekonomian rumah tangga , yang mana norma-norma tersebut bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani serta bertujuan menciptakan kehidupan sejahtera di dunia dan keberuntungan dengan mendapat ridha Allah di akhirat.²⁹

²⁸ Muh.Rizki Prasetya, "*Hilangnya Hak-Hak Anak dan Istri Akibat Nikah Sirri*", Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010), hlm. 24.

²⁹ Dr.Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 48.

Orang tua wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Dalam segala hal dan bentuk, orang tua mempunyai kewajiban untuk memenuhi segala yang dibutuhkan oleh anaknya dalam materiil. Yang meliputi sandang dan pangannya, tempat tinggal, serta kebutuhan, serta kebutuhan ekonomi lainnya. Hal ini akan menjadi tanggung jawab orang tua sampai anak dewasa atau menikah. Batas dewasa yang dimaksudkan adalah sebelum anak mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.³⁰

Ekonomi dalam hal ini sangatlah penting terlebih dengan perkembangan anak, mengingat pendidikan saat ini sangatlah membutuhkan biaya yang cukup besar. Ekonomi juga berperan dalam menunjang kesejahteraan dan kesehatan anak sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.

b) Pendidikan

Hak selanjutnya yang sangat dibutuhkan seorang anak adalah pendidikan. Yang mana orang tua berkewajiban dalam mendidik anak-anaknya sebagai bekal masa depannya nanti. Pendidikan disini tidak hanya diterima oleh anak di sekolah, namun yang lebih

³⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (1).

penting adalah rumah. Sebab segala perilaku yang dimiliki seorang anak adalah tergantung bagaimana orang tua mendidik anaknya.

Orang tua disini sangatlah berperan penting dalam menunggang masa depan seorang anak. Orang tua lah yang mengajarkan bagaimana perbuatan yang baik dan buruk terhadap anaknya.

Namun seorang anak juga berhak menentukan pendidikannya sendiri demi pengembangan tingkat kecerdasannya dengan pengawasan dari orang tuanya.

c) Perlindungan

Setiap manusia sudah selayaknya dia membutuhkan suatu perlindungan, tidak terlepas dengan seorang anak. Yang mana seorang anak yang belum memenuhi batas usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum, sangat membutuhkan perlindungan dari orang tuanya. Kewajiban orang tua juga melindunginya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT dengan pendidikan agama.

Perlindungan disini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.³¹

d) Nama

Setiap anak mempunyai hak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan. Selain itu seorang anak juga berhak mengetahui siapa orang tuanya dan mendapat pengasuhan dari orang tuanya sendiri.

e) Berpendapat

Kita wajib menghargai pendapat siapapun termasuk pendapat seorang anak. Bukan karena seorang anak masih kecil sehingga kita menyepelekan pendapatnya, mereka berhak menyatakan pendapat, mencari dan menerima informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya.

f) Waris

Setiap anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang, dia berhak mendapatkan haknya sebagai pewaris dari harta yang dimiliki orang tuanya.

Sedangkan kewajiban ayah atau suami atas anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan adalah yang telah dijelaskan

³¹ Lihat Pasal 3 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

dias. Hak-hak yang disebutkan diataslah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang ayah atau suami untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan oleh seorang anak hasil dari perkawinan yang sah maupun perkawinan yang tidak dicatatkan atau pekawinan *sirri* sejak anak berada didalam kandungan atau rahim ibunya sampai dia dewasa atau *baligh* atau telah cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

Menurut Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili ada tiga syarat yang mewajibkan nafkah atas anak:³²

- a) Orang tua tergolong mampu untuk memberi nafkah atau mampu bekerja

Apabila orang tua kaya atau mampu bekerja, malah wajib banginya untuk member nafkah kepada anaknya. Namun jika dia tidak mempunyai harta, namun dia masih mampu dalam bekerja, menurut mayoritas ulama dia berkewajiban untuk mencari penghasilan. Dan jika dia menolak untuk bekerja, maka pihak pengadilan berhak menahannya. Adapun apabila orang tua dalam keadaan ekonomi yang susah dan tidak mampu untuk bekerja, dan dia sendiri dinafkahi orang lain, maka dia tidak berkewajiban member nafkah kepada anaknya.

Menurut ulama Malikiyyah bahwa apabila seorang ayah sendiri susah dalam artian tidak mampu untuk memberi nafkah terhadap anaknya, walaupun masih sanggup untuk bekerja, dia tidak memiliki kewajiban untuk memberi nafkah terhadap anaknya.

³² Wahbah A-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Addilatuhu Jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 137.

- b) Anak-anak dalam keadaan miskin tidak punya harta dan tidak mampu untuk bekerja

Anak yang miskin dalam arti belum dewasa atau baligh, yang belum bisa bekerja atau menghasilkan pendapatan maka wajib bagi orang tua untuk member nafkah kepadanya. Namun untuk anak yang sudah memiliki penghasilan atau sudah dapat bekerja makan orang tua tidak wajib memberi nafkah kepadanya.

- c) Tidak berbeda agama

Apabila seorang anak berbeda agama dalam sambungan nasab dengan ayahnya, maka tidak wajib baginya untuk mendapat nafkah dari ayahnya. Karena mendapatkan nafkah sama dalam kategori ahli waris.

Sebab dari perkawinan *sirri* atau perkawinan yang tidak dicatatkan atau sering disebut sebagai perkawinan bawah tangan di kalangan masyarakat sering kali tidak memfikirkan apa saja akibat terhadap perkawinan *sirri* yang dilakukan, terlebih terhadap status anak hasil dari perkawinan *sirri* tersebut dan hak-hak yang telah disebutkan diatas, dalam hal ini penulis lebih menfokuskan dalam hak nafkah.

4. Faktor-Faktor Penghalang Wajib Nafkah

a) Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu ikatan dua insan yang disatukan melalui suatu akad nikah. Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa suatu perkawinan merupakan penyebab adanya kewajiban pemenuhan nafkah bagi seorang suami atau ayah. Apabila dalam suatu perkawinan tersebut lahir seorang anak atau beberapa, maka merupakan kewajiban untuk seorang suami atau ayah untuk melaksanakan kewajiban guna memenuhi hak-hak seorang anak.

Dalam hal perkawinan *sirii* lah yang merupakan penyebab tidak terpenuhinya hak-hak seorang anak, karena perkawinan ini merupakan perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Seperti kita ketahui bahwa perkawinan yang sah merupakan perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan.³³ Yang menyebabkan hilangnya hak seorang anak atas ayah kandungnya sebab tidak

³³ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB I Pasal 2.

dicatatnya perkawinan tersebut. Seperti hak nafkah, hak wali, hak waris, dan lain-lain.

b) Nasab

Nasab secara bahasa berarti keturunan atau kerabat.³⁴ dari arti tersebut terdapat batasan dari pengertian diatas bahwa nasab merupakan pertalian keluarga melalui akad nikah dari perkawinan yang sah. Nasab disini adalah hasil dari suatu perkawinan yang sah, setelah terjadi suatu perkawinan dan lahirnya seorang anak. Anak tersebut apakah merupakan keturunan atau mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya atau tidak. Dengan demikian perkawinan *sirri* yang telah dijelaskan diatas bahwa perkawinan ini bukanlah perkawinan yang sah menurut hukum Indonesia sebab tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Maka, nasab disini juga berpengaruh dalam pemberian nafkah terhadap anak hasil dari perkawinan *sirri*.

Bahwa seorang anak yang lahir diluar perkawinan atau perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan *sirri* hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya secara hukum yang berlaku di Indonesia dan ini menyebabkan kebebasan untuk

³⁴ Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2013), hlm. 24.

seorang laki-laki atau seorang ayah untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

c) Ekonomi

Ekonomi merupakan faktor yang sangatlah penting dalam hal pemenuhan suatu kebutuhan seorang anak, seperti yang telah dijelaskan diatas pemenuhan kebutuhan seorang anak dari dia lahir sampai dia berumur dewasa atau *baligh* sangatlah banyak seperti sandang, pangan, papan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya, juga kebutuhan guna pendidikan anak yang saat ini tidaklah murah. Ekonomi juga berperan dalam menunjang kesejahteraan dan kesehatan anak sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.

Apabila seorang ayah tidaklah mampu dari segi ekonomi, lalu siapa yang akan memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan oleh anak. Memang dalam hal pemenuhan nafkah seorang anak, apabila seorang ayah tidak dapat melakukan kewajiban tersebut karena ayah tidak mampu dari segi ekonomi, dapat digantikan oleh kerabatnya seperti ayah dan ibunya. namun alangkah baiknya seorang ayah bertanggung jawab atas anak yang telah dia lahirkan bersama isterinya walaupun hasil dari perkawinan yang tidak sah atau tidak dicatatkan.

BAB III

PEMBERIAN NAFKAH TERHADAP ANAK HASIL DARI

PERKAWINAN SIRRI DI DESA ARGOPENI KECAMATAN KEBUMEN

KABUPATEN KEBUMEN

A. Gambaran Umum Desa Argopeni Kec.Kebumen Kab.Kebumen

1. Keadaan Geografis

Desa Argopeni terletak dibagian timur wilayah Kecamatan Kebumen di Kabupaten Kebumen. Dengan luas wilayahnya adalah 197,50 hektar yang terbagi menjadi 6 Rukun Warga (RW). Jumlah keseluruhan penduduk di desa ini per 2016 terdiri dari 890 KK dengan jumlah penduduk 3.429 jiwa. Dengan perincian, jenis kelamin laki-laki sebanyak 1.739 jiwa, dan jenis kelamin wanita sebanyak 1.690 jiwa. Dengan luas wilayah diatas dan dihuni dengan jumlah tersebut menyebabkan desa ini termasuk desa yang padat penduduk. Berikut table luas wilayah di lingkungan Desa Argopeni Kecamatan Kabupaten Kebumen.

Tabel 1

Data rincian Luas Wilayah Desa Argopeni Kecamatan Kebumen

Kabupaten Kebumen

No	Keterangan	Luas	Persentase
A	Tanah Tegalan dan pekarangan	43,00 Hektar	23,96 %
b.	Tanah Hutan	10,00 Hektar	5,57 %

c.	Persawahan	70,00 Hektar	39,00 %
d.	Tanah Pemukiman dan fasilitas umum	47,70 Hektar	26,57 %
e.	Tanah Kas Desa	8,80 Hektar	4,90 %

Dari tabel diatas rlihat bahwa luas wilayah Desa Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen paling banyak digunakan sebagai Lahan Persawahan dengan persentase 39,00 %, kemuiian diikuti dengan Lahan Pemukiman dan fasilitas umum dengan persentase 26,57 %, kemudian Lahan Tegalan dan pekarangan dengan persentase 23,96 %, lalu Lahan Perhutanan sekitar 5,57 % dan yang terakhir yaitu Lahan Kas Desa dengan persentase 4,90 %.

Desa ini merupakan salah satu Desa Berkembang di Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Jarak dengan pusat kota pemerintah Kabupaten Kebumen sejauh ± 5 Km.

Wilayah Desa Argopeni Kecamatan Kbumen Kabupaten Kebumen berbatasan dengan:

- a Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Roworejo
- b Di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kalibagor
- c Di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kalibagor dan Pekunden
- d Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Wonosari dan Jatisari

2. Mata Pencaharian Penduduk

Desa Argopeni memiliki jumlah penduduk 3,429 jiwa, dengan rincian usia produktif bekerja berjumlah 2,325 jiwa, sedangkan usia non-produktif atau tidak layak untuk bekerja sebanyak 1,104 jiwa.

Tabel 2

Data jumlah jiwa berdasarkan pekerjaan di Desa Argopeni

Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
a.	Petani	139 Jiwa	4,1 %
b.	Pedagang	205 Jiwa	5,99 %
c.	Buruh	283 Jiwa	8,27 %
d.	Ibu Rumah Tangga	642 Jiwa	18,76 %
e.	Wiraswasta	856 Jiwa	25,01 %
f.	Swasta	44 Jiwa	1,29 %
g.	Pegawai Negeri Sipil	18 Jiwa	0,52 %
h.	Pensiunan	12 Jiwa	0,35 %
i.	Pelajar	619 Jiwa	18,1 %
j.	Belum Bekerja	585 Jiwa	17,39 %

Dari data tabel di atas terlihat bahwa mayoritas penduduk di Desa Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen mempunyai pekerjaan atau mata pencaharian sebagai wiraswasta dengan persentase

25,01 %, kemudian diikuti oleh ibu rumah tangga dengan persentase 18,76 %, di point selanjutnya adalah pelajar dengan persentase 18,1 %, belum bekerja dengan persentase 17,39 %, kemudian pekerjaan atau mata pencaharian buruh dengan persentase 8,27 %, pedangang dengan persentase 5,99 %, petani dengan persentase 4,1 %, swasta dengan persentase 1,29 %, kemudian pegawai negeri sipil dengan jumlah persentase 0,5 %, dan terakhir pekerjaan sebagai pensiunan dengan persentase 0,35 %.

3. Pendidikan Masyarakat Desa

Di Desa Argopeni sesuai dengan Daftar Isian Profil Desa Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2016 mempunyai 1 (satu) Sekolah Dasar yaitu SD N Argopeni. Selain sekolah dasar di desa argopeni juga terdapat Taman Kanak-kanak yaitu Taman Kanak-kanak Tarbiyah Masyitoh, dan juga terdapat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bangun Indah. Untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Atas (SMP/SMA) penduduk desa argopeni yang masih dalam usia produktif belajar harus menempuh perjalanan 10 menit ke sekolah terdekat dengan desa argopeni, dengan jarak ke pusat kota ± 5 km memudahkan para pelajar untuk menempuh jenjang pendidikan tingkat SMP/SMA. Sedangkan untuk para mahasiswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan di Kabupaten Kebumen sendiri terdapat 4 (empat) perguruan tinggi swasta yaitu Institut Agama Islam Nadatul Ulama (IAINU), Sekolah Teknik

Informatika Ekonomi (STIE) Putra Bangsa, Politeknik Dharma Patria (POLDA), dan Universitas Ma'arif Nadatul Ulama (UMNU) yang kurang lebih dapat dijangkau dengan angkutan umum dan kendaraan pribadi selama ± 10 menit. Namun terdapat juga para mahasiswa lebih memilih untuk melanjutkan bangku perkuliahan ke Universitas yang diinginkan, seperti Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Universitas Negeri Semarang (UNNES), Universitas Muhamaddiyah Purworejo (UMP), Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga dan universitas lain yang mahasiswa inginkan.

Tabel 3

Data tingkat pendidikan penduduk Desa Argopeni Kecamatan
Kabupaten

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
a.	Tidak Tamat SD	972 Jiwa	44,30 %
b.	SD	825 Jiwa	37,60 %
c.	SLTP/SMP	327 Jiwa	14,90 %
d.	SLTA/SMA	47 Jiwa	2,14 %
e.	D1	3 Jiwa	0,14 %
f.	D2	4 Jiwa	0,18 %
g.	D3	7 Jiwa	0,32 %
h.	S1	9 Jiwa	0,41 %

4. Kondisi Ekonomi

Seperti pada tabel 1 telah dijelaskan bahwa 39 % dari luas wilayah Desa Argopeni adalah lahan persawahan. Namun di tabel 2 dijelaskan bahwa 25,01 % dari seluruh jumlah penduduk Desa Argopeni memiliki mata pencaharian sebagai wiraswasta. Mayoritas penduduk Desa Argopeni yang setelah ia menyelesaikan jenjang pendidikan SD dan SMP lebih memilih meninggalkan kampung halamannya untuk mencari pekerjaan di kota besar sebagai karyawan pabrik atau wiraswasta lain. Selain wiraswasta penduduk Desa Argopeni juga memanfaatkan lahan persawahan, tegal, dan hutan sebagai sumber mata pencaharian mereka sehari-hari dengan menanam padi, palawija, kayu, dan lain-lain, yang lalu hasil dari perkebunan atau palawija dijual ke pasar terdekat yaitu Pasar Wonosari yang hanya berjarak 1 km dari Desa Argopeni.

B. Pemberian Nafkah Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Sirri Di Desa Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen

a. Anak Dari Perkawinan Sirri Di Desa Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen

Sebelum jauh membahas mengenai anak hasil dari perkawinan *sirri*, anak terlahir dari suatu perkawinan. Perkawinan *sirri* di dalam masyarakat Desa Argopeni khususnya merupakan perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau dilakukan tanpa

sepengetahuan khalayak orang banyak.¹ Perkawinan ini sering kali terjadi di masyarakat Desa Argopeni karena sebab-sebab tertentu, seperti sang isteri sah nya tidak mengizinkan untuk berpoligami atau karena tuntutan pekerjaan yang menyebabkan seorang laki-laki dilarang untuk melakukan perkawinan lebih dari satu, atau untuk melakukan perkawinan lebih dari satu harus melalui berbagai proses yang panjang agar mendapat izin dari instansi atau perusahaan.

Kemudian anak merupakan amanah yang diberikan Allah SWT yang patut dijaga oleh orang tuanya. Di desa Argopeni sendiri terdapat 595 jiwa anak yang masuk dalam kategori usia dibawah umur.² Masyarakat desa Argopeni menganggap, anak merupakan suatu insan yang terlahir sebab suatu perkawinan yang sah atau perkawinan *sirri*. Di desa Argopeni masyarakat menganggap anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan secara *sirri* tetap anak mereka, sepanjang anak tersebut dilahirkan dari pasangan suami-isteri.³ Namun dalam hal anak yang lahir dari suatu perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ini di masyarakat desa Argopeni mereka kehilangan hak wali. Hak wali disini adalah apabila si anak telah berusia dewasa dan akan melakukan

¹ Wawancara dengan Bapak Suprpto (Kepala Desa Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen) pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017, Jam 10.00, di Kantor Kelurahan Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

² Daftar Isian Profil Desa Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2016.

³ Wawancara dengan Bapak Suprpto (Kepala Desa Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen) pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017, Jam 10.00, di Kantor Kelurahan Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

perkawinan, dia tidak dapat diwalikan oleh ayahnya sebab perkawinan yang dilakukan orang tuanya *sirri*. Sama halnya dengan hukum Islam yang mana apabila anak terlahir dari perkawinan secara *sirri* akan menyebabkan hilangnya hak-hak anak seperti hak wali, hak nafkah dan hak waris. Berbeda dengan hukum Indonesia, sepanjang anak yang terlahir dari perkawinan *sirri* dapat dibuktikan bahwa anak tersebut memang merupakan anak kandung dari ayah biologisnya, anak tersebut tetap bisa mendapatkan haknya sama seperti anak hasil perkawinan sah yang lain.⁴

Untuk menambah data dan informasi yang lebih akurat, penulis menemui beberapa informan dan pelaku perkawinan *sirri* yang terjadi di desa Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, diantaranya Bapak Suprpto, Bapak Muhammad, dan Bapak Johan.;

a Wawancara dengan Bapak Suprpto

Sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Suprpto selaku Kepala Desa Aropeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen anak yang dilahirkan dari suatu pernikahan yang dicatatkan maupun tidak dicatatkan, anak tersebut tetap anak yang sah. Seperti halnya anak angkat, apabila ayah dan ibu angkat menghendaki mengangkat seorang anak lalu mereka akui sebagai anak mereka, anak tersebut tetap anak mereka. Beliau menambahkan, bahwa anak yang dihasilkan dari perkawinan *sirri* sepanjang ayah dari anak tersebut mengakui adanya

⁴ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

anak tersebut dan sepanjang anak tersebut dilahirkan dari suatu hubungan yang halal atau sah menurut hukum Islam, ayah atau suami tetap mengakui adanya anak hasil perkawinan *sirri*. Dari kesimpulan wawancara yang dilakukan penulis terhadap informan ini, dalam hal perkawinan *sirri* beliau tidak melarang adanya perkawinan *sirri* di Desa Argopeni, karena hal tersebut berkaitan dengan hak mereka sebagai warga negara dan hal pribadi yang perangkat desa tidak dapat melarangnya. Namun dalam hal tersebut perangkat desa, kyai ataupun ulama setempat tetap menghimbau dan member pengetahuan tentang sebab akibat apabila perkawinan tersebut dilakukan.

b Wawancara dengan Bapak Muhammad

Berbeda dengan Bapak Muhammad selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Anak yang sah adalah anak yang dihasilkan atau dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah, artinya sah yang dilaksanakan atau disaksikan didepan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) setempat.⁵ Atau perkawinan yang dilakukan sesuai prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ataupun dalam aturan-aturan yang tertulis lainnya. Dalam hal ini Bapak Muhammad menambahkan bahwa beliau pribadi dan Kantor Urusan Agama (KUA) sangat melarang adanya perkawinan *sirri*. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ataupun pegawai selalu memberikan sosialisasi tentang

⁵ Wawancara dengan Bapak Muhammad (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen) pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017, pukul 10.00 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

perkawinan yang benar dengan kata lain dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dan juga menghimbau masyarakat khususnya Kecamatan Kebumen untuk tidak melakukan perkawinan *sirri*, dan juga menjelaskan apa saja sebab dan akibat yang ditimbulkan apabila hal tersebut terjadi.

c Wawancara dengan Bapak Johar

Sementara menurut Bapak Johar selaku penghulu atau pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, mengatakan bahwa anak sah adalah dia yang terlahir dari suatu hubungan atau suatu perkawinan yang sah secara agama ataupun secara hukum negara.⁶ Beliau menambahkan bahwa anak yang terlahir dari suatu perkawinan yang sah maupun tidak, orang tua berkewajiban untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kebutuhan yang diperlukan sang anak. Dengan kata lain bahwa perkawinan *sirri* adalah perkawinan yang sah walaupun perkawinan tersebut tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat.

b. Pemberian Nafkah Anak Hasil Dari Perkawinan Sirri

Nafkah merupakan segala kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain.⁷ Sama halnya seperti pernyataan diatas nafkah menurut masyarakat Desa Argopeni terdiri dari 2 (dua) macam yaitu lahiriyah

⁶ Wawancara dengan Bapak Johar (Penghulu atau Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen) pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017, pukul 10.00 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

⁷ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2008), hlm. 443.

dan batiniah. Dalam hal ini Bapak Suprpto selaku Kepala Desa Argopeni menyebutkan nafkah berupa segala kebutuhan yang diperlukan oleh anak yang berupa sandang, papan, kebutuhan untuk makan dan juga untuk biaya pendidikan. Adapun apabila seorang anak yang belum memenuhi umur dewasa (*baligh*), kebutuhan atau nafkah diberikan kepada sang ibu guna memenuhi kebutuhan si anak yang masih kecil.

Dalam takaran pemberian nafkah diberikan sesuai kebutuhan si anak sepanjang sang ayah atau suami mampu dalam hal penenuhan nafkah untuk anak. Adapun apabila seorang ayah atau suami tidak mampu atau telah meninggal nafkah yang menjadi tanggung jawab ayah diberikan kepada keluarga seperti kakek, nenek, bibi atau paman.

Tabel 3

Daftar Informan Yang Melakukan Perkawinan *Sirri*

No	Nama	Pekerjaan	Anak	Hak Nafkah	Alasan Nafkah
1.	Imam Wahyudi dan Fitriani	Wiraswasta dan Ibu Rumah Tangga	1 Anak perempuan berusia 2 (dua) bulan.	1 juta rupiah per bulan.	-
2.	Syukurudin dan Fatimah	Pengangguran dan Pedagang	1 (satu) anak perempuan berusia 13	-	Ekonomi

			(tiga belas) tahun.		
3.	Mulyadi dan Endang	Pegawai Negeri Sipil dan Pedagang	1 (satu) anak perempuan berusia 4 (empat) tahun.	-	Perkawinan
4.	Sujadi dan Parsilah	Makelar dan Pedagang	2 (dua) anak perempuan berusia 24 (dua puluh empat) dan 18 (delapan belas) tahun.	-	Ekonomi dan Perkawinan

Dari tabel diatas menjelaskan terdapat 4 (empat) pasangan yang melakukan perkawinan *sirri*. Dari 4 (empat) pasangan tersebut penulis melakukan wawancara terhadap masing-masing pasangan.

a. Wawancara dengan Bapak Imam Wahyudi

Bapak Imam Wahyudi (18) merupakan seorang maintenance disuatu PT di Cikarang kota Bekasi. Dengan pendapatan 3 (tiga) juta

rupiah perbulan.⁸ Menikah dengan Ibu Fitriani (17). Alasan bapak Imam dan ibu Fitriani menikah secara *sirri* dikarenakan ibu Fitriani telah mengandung ketika itu, kemudian pada saat mereka menikah ibu Fitriani telah mengandung 3 (tiga) bulan. Karena umur bapak Imam dan ibu Fitriani belum memenuhi syarat usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Sehingga perkawinan *sirri* merupakan jalan terbaik untuk menutupi apa yang telah mereka lakukan.

Dari perkawinan *sirri* tersebut lahir seorang anak perempuan yang saat ini telah berusia 2 (dua) bulan. Untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan ibu Fitriani dan sang buah hati, setiap satu bulan sekali bapak Imam rutin mengirim hasil keringatnya selama satu bulan sebesar 1 (satu) juta rupiah.⁹ Ibu Fitriani menuturkan bahwa uang yang diberikan dari suaminya dirasa kurang, karena untuk memenuhi kebutuhan sang anak seperti susu formula, popok bayi, sabun dan lain-lain, uang tersebut telah habis untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sehingga apabila uang yang diberi oleh suaminya habis atau kurang guna memenuhi kebutuhannya dan buah hati mereka, ibu Fitriani dibantu oleh keluarganya, yang mana beliau selama bapak Imam pergi merantau untuk bekerja ibu Fitriani tinggal bersama keluarganya.

⁸ Wawancara dengan Bapak Imam Wahyudi, pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017, pukul 13.00 di Desa Argopeni Rt.03 Rw.03 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

⁹ Wawancara dengan Ibu Fitriaani, pada tanggal 25 Agustus 2017, pukul 16.00 di Desa Jatisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen

b. Wawancara dengan Bapak Syukuruddin

Bapak Syukuruddin (50) seorang pengangguran atau tidak bekerja. Sebab beliau tidak bekerja karena beliau mengalami sakit stroke 3 (tiga) tahun terakhir. Sebelum mengalami sakit stroke bapak Syukuruddin dahulunya adalah seorang pedagang tembakau di pasar tradisional. Bapak Syukuruddin menikahi ibu Fatimah secara *sirri* pada tahun 2002 yang dilakukan di kediaman sang isteri dengan dihadiri oleh kerabat isterinya. Selain menikah secara *sirri*, bapak Syukuruddin juga mempunyai isteri yang dinikahi secara sah. Dari pernikahan yang pertama ini beliau dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing telah mempunyai keluarga sendiri. Sedangkan dari perkawinan *sirri* nya beliau dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun.¹⁰

Terhadap apa yang menimpa suaminya, ibu Fatimah selama 3 (tiga) tahun tersebut tidak pernah mendapatkan hak nafkah dari suaminya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan kebutuhan sekolah anaknya.¹¹ Sebagai gantinya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari beliau bekerja sebagai pedagang sayur di pasar. Manda anak dari bapak Syukuruddin dan ibu Fatimah saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun dan duduk di kelas 8 (delapan)

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Syukuruddin, pada hari Jum'at, tanggal 28 April 2017, pukul 08.00 di Desa Argopeni Rt.03 Rw.03 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

¹¹ Wawancara Ibu Fatimah, pada tanggal 20 Agustus 2017, pada pukul.10.00. di Warung Makan Kedai Santai Kecamatan Kebumen.

SMP (Sekolah Menengah Pertama).¹² Semenjak sang ayah menderita sakit stroke, di tahun pertama ia terkadang satu kali dalam sebulan menengok ayah di rumah dengan diantar oleh kerabatnya. Apabila manda pulang sehabis menengok ayahnya ia terkadang diberi uang saku 50 (lima puluh) dan terkadang tidak diberi. Namun saat ini ia tidak pernah datang menengok ayahnya kembali sebab hubungan keluarga dari pernikahan sah ayahnya tidak senang dengan keadirannya. Sehingga saat ini ia tidak pernah lagi mendapat uang saku dari sang ayah. Dengan ia tidak mendapatkan uang saku dari ayahnya, setiap harinya untuk saku sekolahnya dan segala kebutuhannya dipenuhi oleh sang ibu.

c. Wawancara dengan Ibu Endang

Ibu Endang (45) merupakan seorang pedagang makanan siap saji. Dinikahi oleh bapak Mulyadi pada tahun 2013 secara *sirri* di kediamannya yang dilakukan dihadapan kyai setempat dan 2 (dua) orang saksi.¹³ selain menikahi ibu Endang secara *sirri*, bapak Mulyadi juga mempunyai isteri yang dinikahi secara sah. Dari perkawinan sah ini, bapak Mulyadi dikaruniai 5 (lima) orang anak. Sedangkan dari perkawinan *sirri* nya beliau dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini telah berusia 4 (empat) tahun. Bapak Mulyadi sendiri bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

¹² Wawancara dengan Manda, pada tanggal 2 Januari 2018, pada pukul 12.00, di Sekolah Menengah Pertama 3 Kutowinangun.

¹³ Wawancara dengan Ibu Endang, pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017, pukul 15.00 di Desa Argopeni Rt.02 Rw.04 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

Dengan pendapatan 2 (dua) juta rupiah per bulan. Dengan penghasilan sebesar itu, bapak Mulyadi gunakan sebesar 600,000,00-. untuk membayar cicilan hutangnya di bank konvensional.¹⁴ Sedangkan sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anaknya yang pertama, yang mana secara hukum negara merekalah yang berhak mendapatkan hak tersebut.

Ibu Endang sebagai isteri *sirri* dari bapak Mulyadi, mengatakan bahwa beliau jarang mendapatkan uang atau hak nafkah dari suami dengan alasan kebutuhan isteri dan anak-anak isterinya banyak dan mereka yang lebih berhak untuk mendapatkan hak tersebut. Dinda merupakan buah hati dari ibu Endang dan bapak Mulyadi yang saat ini berusia 4 (empat) tahun. Ibu Endang menuturkan, sang anak sering kali menanyakan dimana ayahnya, karena sang ayah jarang mempunyai waktu luang untuknya dan anaknya. Sejak buah hatinya lahir bapak Mulyadi setiap bulannya memberikan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sang isteri dan anaknya sebesar 500,000,00-., namun sejak bulan maret ibu Endang tidak pernah lagi mendapatkan hak nafkah tersebut. Setelah bulan tersebut setiap kali sang suami pulang ke rumah, sang buah hati

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Mulyadi, pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2017, pukul 15.00 di Desa Argopeni Rt.02 Rw.02 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

terkadang diberi uang 50,000,00- untuk jajan, tanpa memberi uang untuk kebutuhan lain.¹⁵

d. Wawancara dengan Bapak Sujadi

Bapak Sujadi (55) merupakan seorang makelar jual-beli sepeda motot dengan penghasilan yang tidak tetap setiap bualannya. Menikah dengan ibu Parsilah (48) secara *sirri* pada tahun 1993 di kediaman sang isteri.¹⁶ Selain menikah secara *sirri* bapak Sujadi juga menikah secara sah yang telah berusia 43 (empat puluh tiga) tahun. Dari perkawinan *sirri* nya beliau dianugerahi 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama telah menikah yang kedua berusia 18 (delapan belas) tahun bekerja sebagai seorang sales. Sedangkan dari perkawinan yang pertama beliau dikaruniai 6 (enam) orang anak. Walaupun beliau mempunyai isteri 2 (dua) yang dinikahi secara sah menurut aturan dan secara *sirri*, namun hubungan antara kedua isterinya baik selayaknya kerabat keluarga.

Walaupun berhubungan baik layaknya kerabat dekat, namun keduanya belum pernah bertemu satu sama lain. baik disini mempunyai arti bahwa, isteri pertama dari bapak Sujadi tidak menentang pernikahan *sirri* yang beliau lakukan.¹⁷ Namun dengan penghasilan yang tidak menetap dalam satu bulan, ibu Parsilah

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Mulyadi, pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2017, pukul 15.00 di Desa Argopeni Rt.02 Rw.02 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Sujadi, pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017, pukul 19.00 di Desa Argopeni Rt.02 Rw.03 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Parsilah, pada tanggal 21 Agustus 2017, pukul 09.00 di Pantai Petanahan Kecamatan Petanahan.

menuturkan bahwa bapak Sujadi jarang memberikan hak nafkah nya setiap bulan. Suaminya akan memberi apabila ibu Parsilah memintanya. Setiap harinya ibu Parsilah hanya mengandalkan penghasilan dari jualan sayuran di pasar tradisional.¹⁸ Sebab beliau sering meminta hak nafkah tersebut

Anak kedua dari perkawinan *sirri* bapak Sujadi dan ibu Parsilah menuturkan bahwa sebelum dia bekerja sebagai sales saat ini, ayahnya jarang memberikan uang kepadanya.¹⁹ Sedangkan saat itu ia masih membutuhkan banyak biaya untuk memenuhi kebutuhannya, biaya sekolah dan keperluan lain. dan setiap kali ia meminta kepada ayahnya secara langsung, ayahnya mengatakan sedang tidak memiliki uang, terkadang mengatakan bahwa uangnya sudah digunakan untuk keperluan saudara tirinya.

C. Alasan Pemberian Nafkah Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Sirri Di Desa Argopeni Kec.Kebumen Kab.Kebumen

Seperti yang telah penulis melakukan penelitian terhadap tema yang diambil dalam memenuhi tugas skripsi ini. Dapat penulis simpulkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi alasan yang menyebabkan terjadinya pemberian nafkah terhadap anak hasil dari nikah *sirri*.

1. Ekonomi

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Sujadi, pada hari Jum'at, tanggal 27 Juli 2017, pukul 19.00 di Desa Argopeni Rt.02 Rw.04 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

¹⁹ Wawancara dengan Dinda, pada tanggal hari Rabu 3 Januari 2018, pukul 08.00 di Pantai Petanahan

Alasan ekonomi yang penulis ambil bahwa pada kasus informan yang penulis temui mayoritas memberikan alasan mereka tidak memberikan nafkah kepada anak hasil dari perkawinan *sirri* yang mereka lakukan dan juga isteri. Seperti halnya Bapak Imam karena dia yang masih berusia muda dan pekerjaan nya yang sekarang dia tekuni belum bisa menghasilkan penapatan yang dapat mencukupi segala kebutuhan sang isteri dan anak, yang masih dikandung ibunya. Oleh karena itu kerabatnya membantunya dalam pemenuhan nafkah anak dan isterinya apabila terdapat kekurangan dalam kebutuhan sehari-hari.²⁰

Lain halnya dengan Ibu Endang yang sang suami bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dia ketahui bahwa penghasilan dalam sebulan pasti ada. Namun karena sang suami mempunyai isteri lain yang dinikahi secara hukum negara dan mempunyai 5 (lima) anak. Suami ibu Endang sendiri merasa sangat terbebani dengan 5 (lima) orang anak dengan isteri pertamanya ditambah lagi dengan anak hasil dari perkawinan *sirri*, dia beralasan kebutuhan di era sekarang sangatlah tidak murah sedangkan dengan gaji sang suami dalam 1 (satu) bulan hanya 2 juta rupiah.²¹

Bapak Sujadi juga memberikan alasan bahwa dia mempunyai isteri sahnya yang mempunyai 6 (enam) orang anak

²⁰ Wawancara dengan Bapak Imam, pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017, pukul 13.00 di Desa Argopeni Rt.03 Rw.03 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

²¹ Wawancara dengan Ibu Endang, pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017, pukul 15.00 di Desa Argopeni Rt.02 Rw.04 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

yang 3 (tiga) diantara mereka masih sangat membutuhkan biaya untuk kehidupan mereka. Ditambah lagi penghasilan bapak sujadi setiap bulannya tidak pasti, karena pekerjaan sebagai makelar jual-beli motor tidak setiap masyarakat setiap hari membutuhkan sepeda motor.²²

2. Perkawinan

Dalam hal ini penulis menemukan beberapa kasus selama melakukan penelitian. Salah satunya Ibu Endang (40) salah satu pelaku pernikahan *sirri*, yang mana suami dari pernikahan *sirri* nya 1 tahun sebelum bercerai dengan suaminya tidak mendapat nafkah untuk dirinya dan juga anaknya. Adapun alasan mengapa sang suami tidak memberikan nafkahnya karena dia sudah terlalu berat untuk memberi nafkah kepada isteri pertamanya yang dinikahi suaminya secara hukum negara. Dari keterangan ibu ini bahwa sempat sang suami mengatakan bahwa ia bukanlah isteri sah nya secara hukum negara, sehingga dia tidak mempunyai kewajiban penuh atas pemenuhan hak nafkah untuk dirinya dan juga anak-anaknya.²³

²² Wawancara dengan Bapak Sujadi, pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017, pukul 19.00 di Desa Argopeni Rt.02 Rw.03 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

²³ Wawancara dengan Ibu Endang, pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017, pukul 15.00 di Desa Argopeni Rt.02 Rw.04 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH ANAK HASIL DARI PERKAWINAN SIRRI

A. Analisis Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Sirri di Desa Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen

Sebelum jauh membahas analisis pemberian nafkah terhadap anak akibat dari perkawinan *sirri*, terdapat beberapa hal yang menurut penulis perlu diperhatikan agar penulis dapat dengan mudah memahami. Sebagaimana teori-teori yang telah dipaparkan di dalam pembahasan sebelumnya bahwa perkawinan *sirri* adalah suatu perkawinan yang dilaksanakan secara rahasia dan tidak diketahui oleh khalayak orang banyak dan hanya disaksikan oleh wali dan 2 (dua) orang saksi.¹ Namun dalam hal tersebut menurut ketua Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Kecamatan Kebumen perkawinan *sirri* merupakan suatu perkawinan yang dilakukan tanpa disaksikan oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat untuk masyarakat muslim dan Kantor Catatan Sipil (CAPIL) untuk masyarakat yang non muslim.² Penulis sependapat dengan pendapat kepala Kantor Urusan Agama diatas, bahwa perkawinan *sirri* adalah perkawinan yang tidak hanya dilakukan secara sembunyi-bersembunyi namun juga yang tidak dilakukan

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Suprpto (Kepala Desa Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen) pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017, Jam 10.00, di Kantor Kelurahan Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

² Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen) pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017, pukul 10.00 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen .

dihadapan petugas pencatat nikah dan tidak dicatatkan di kantor urusan agama setempat atau kantor catatan sipil.

Menurut Imam Malik berdasarkan hadits dari Abi Zubair Al-Maliki, yang menyampaikan hadits Umar bin Khattab, perkawinan *sirri* adalah perkawinan yang disaksikan oleh seorang saksi laki-laki dan seorang saksi perempuan.³ Dari hadits diatas penulis menyampaikan bahwa perkawinan *sirri* adalah perkawinan yang dilakukan tanpa dipenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Namun saat ini pengertian perkawinan *sirri* telah diperluas, yaitu merupakan perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan masing-masing umat,⁴ namun tidak dicatatkan di kantor Urusan Agama untuk muslim dan Kantor Catatan Sipil untuk non-muslim. Dalam hal suatu perkawinan di Indonesia telah dibuat suatu aturan bahwa perkawinan haruslah dicatatkan supaya tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, seperti hak-hak isteri dan juga anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan.⁵

Selanjutnya akibat dari perkawinan *sirri* tersebut mengakibatkan beberapa hak-hak isteri hilang, terutama anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut hilangnya hak nafkah, hak waris dan hak wali. Sebagaimana yang telah penulis tulis di bab sebelumnya bahwa akibat dari

³ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 155.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, BAB I Pasal 2.

⁵ Kompilasi Hukum Islam, BAB II Pasal 5.

suatu perkawinan *sirri* tersebut adalah hilangnya hak-hak anak yang seharusnya dia terima dari ayah biologisnya.

Menurut penulis anak adalah titipan terindah yang Allah SWT berikan kepada umat-Nya yang harus dijaga dan dilindungi. Dengan adanya seorang anak, orang tua berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh sang anak.⁶ Dan adapun kedudukan atau status seorang anak dalam hukum Islam yang telah penulis jelaskan dalam bab sebelumnya adalah anak kandung, anak angkat, anak susu, anak tiri dan anak diluar nikah.

Anak hasil dari perkawinan *sirri* di Desa Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, adalah ia yang dilahirkan dari suatu perkawinan secara agama maupun yang secara hukum negara. Anggapan bahwa anak yang dilahirkan dari suatu hubungan perkawinan *sirri* adalah anak haram atau anak yang tidak sah karena tidak dilahirkan dari perkawinan yang sah secara hukum Indonesia, di Desa Argopeni tidak pernah beranggapan hal tersebut.⁷

Analisis mengenai anak yang dilahirkan dari perkawinan *sirri* adalah haram, penulis beranggapan bahwa nak yang dilahirkan dari suatu perkawinan baik itu secara *sirri* atau tidak tetaplah anak sah dan anak yang dilahirkan dalam keadaan suci. Sepanjang seorang anak dilahirkan dari suatu hubungan perkawinan dan ayah biologis dari anak tersebut mau

⁶ Bahrudin Muhammad, *Hak Waris Anak DI Luar Perkawinan (Studi Hasil Putusan MK No.46/PUU-VIII2010)*, (Semarang: Fatama Publishing, 2002), hlm. 65.

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Suprpto (Kepala Desa Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen) pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017, Jam 10.00, di Kantor Kelurahan Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

mengakui bahwa dia anaknya, ayahnya berkewajiban untuk memenuhi semua hak-hak terhadap anaknya. Namun dalam hal akibat dari perkawinan *sirri* tersebut mengakibatkan hilangnya hak perwalian untuk anak perempuan yang terlahir dari perkawinan ini. Apabila sang anak telah beranjak dewasa dan melakukan perkawinan maka sang ayah biologis tidak dapat menjadi wali dari anak tersebut.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 42 menjelaskan bahwa anak yang sah merupakan anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah.⁸ Sah dalam pasal tersebut adalah perkawinan yang dilakukan secara hukum aturan yang berlaku di negara Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dilakukan dihadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) serta dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Seperti yang telah penulis paparkan diatas anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang tidak dicatatkan atau tidak dilakukan dihadapan petugas pencatat nikah (PPN) tergolong sebagai anak diluar nikah. Dalam hal anak yang dilahirkan dari perkawinan *sirri* sang anak akan kehilangan hak-hak terhadap ayah biologisnya, diantaranya hak nafkah hak wali, hak waris dan sebagainya yang seharusnya segala hal yang akan dijamin oleh sang ayah justru hilang karena status perkawinan yang dilakukan secara *sirri*. Kemudian seorang anak adalah ia yang terlahir dari perkawinan yang sah,⁹ hal senada yang dikatakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama bahwa anak

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB IX Pasal 42.

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB IX Pasal 42.

yang sah adalah dia yg dilahirkan dari perkawinan yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam undang-undang.¹⁰ Terhadap anak yang terlahir dari perkawinan *sirri* atau perkawinan yang tidak dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia ia tidak dapat dikatakan sebagai anak yang sah dan ia hanya akan memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja.

Pada dasarnya setiap anak yang dilahirkan, baik ia lahir dari suatu perkawinan yang sah atau dari perkawinan *sirri*, seorang anak tetap memiliki status dan kondisi fitrah yang bersih, tanpa dosa dan noda. Tidak ada anggapan bahwa anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan *sirri* adalah ia anak haram yang terlahir sebab suatu perkawinan yang tidak dilakukan secara aturan hukum yang berlaku di Indonesia.¹¹

Sebagaimana disebutkan dalam hadist: *Dari Abu Hurairah.ra berkata, Rasulullah saw bersabda: 'Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci) sehingga adalah kedua orang tuanya yang membuat ia beragama Yahudi, Nasrani dan Majusi.'* (HR.Ahmad, Ad-Darimi, An-Nasa'I, Ibnu Jarir, Ibnu Hibban, Ath-Thabrani, Al-Hakim, Abu Na'im, dan Al-Baihaqi)¹² Dalam hadits tersebut menjelaskan bahwa anak yang terlahir dari kasus perzinaan, perselingkuhan, dan dalam kondisi normal tetap

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen) pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017, pukul 10.00 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Suprpto (Kepala Desa Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen) pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017, Jam 10.00, di Kantor Kelurahan Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

¹² Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 125.

dalam kondisi bersih suci tanpa dosa sedikitpun.¹³ Apabila seorang anak yang lahir dari hasil perzinaan saja dianggap bersih, maka anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan, nikah *sirri* dan dalam bentuk perkawinan apa pun tentu saja harus lebih ditekankan kefitrahan dan kebersihannya.

Namun dalam aturan hukum Islam tentang anak zina atau anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah, ia tidak akan memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya dan tidak akan dapat menerima hak nafkah, hak perwalian, dan hak waris dari ayah biologisnya.

Pada masa sekarang, dimana kecanggihan teknologi semakin pesat dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk dalam bidang ilmu kedokteran. Yang mana dari ilmu kedokteran ini terciptanya teknologi yang bernama DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*)¹⁴ dimana teknologi ini digunakan untuk membuktikan apakah seorang anak yang dilahirkan dari rahim ibunya merupakan anak biologis ayahnya. Seperti yang telah dijelaskan dalam undang-undang, bahwa penetapan *nasab* dilakukan dengan cara pembuktian.¹⁵ Di pasal tersebut dijelaskan bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan adanya bukti autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Namun apabila akta kelahiran tidak ditemukan, maka pengadilan dapat menetapkan status anak tersebut dengan cara melakukan pemeriksaan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

¹³ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam . . .* , hlm. 125.

¹⁴ DNA atau *Deoxyribo Nucleic Acid* yaitu asam nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB VII Pasal 55.

Syarat-syarat tersebut yang dimaksud adalah melakukan tes DNA antara anak dan ayah.

Seperti yang dilakukan oleh pedangdut Aisyah Mochtar alias Machica pada tahun 2010 yang lalu. Beliau mengajukan permohonan uji materiil terhadap Mahkamah Konstitusi. Permohonan yang dilakukan machica tersebut memohon kepada mahkamah konstitusi untuk menguji ulang terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang mana bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, dan juga machica menambahkan bahwa Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat segala akibat hukumnya.¹⁶ alasan machica mengajukan permohonan tersebut lantaran anak yang dia lahirkan dari perkawinan *sirri* yang dilakukan dengan Drs. Moerdiono menyebabkan anaknya hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹⁷ Perkawinan yang dilakukan olehnya dirasa telah dilakukan sesuai ketentuan yang telah diatur berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Namun berdasarkan pasal 43 ayat (1) diatas bahwa anak yang dilahirkan nya hanya dapat mempunyai hubungan dengan ibunya dan kerabat ibunya. hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum” yang mana dalam hal ini merugikan hak konstitusi pemohon sekaligus anaknya,

¹⁶ Pdf, Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 43 ayat (1).

yaitu berupa materil dan finansial yang mana machica harus menanggung biaya untuk kehidupan pemohon serta untuk membiayai pemeliharaan dan pengasuhan anak.

Dari permohonan yang diajukan oleh ibu Machica mahkamah memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945. Kemudian memutuskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan darah dengan keluarga ayahnya.¹⁸

Kemudian apabila penulis kaitkan dengan *Qawaid Fiqhiyah* melakukan pembuktian nasab seorang anak dengan teknologi dan ilmu pengetahuan ilmu kedokteran. Penulis kaitkan dengan salah satu dari lima kaidah yaitu المشقة تجلب التيسر yang mempunyai arti bahwa kesukaran itu dapat menarik kemudahan.¹⁹ Maksud dari kaidah diatas adalah suatu kesusahan mengharuskan adanya kemudahan. Penulis mencoba untuk mengkaitkan permasalahan diatas bahwa, apabila melakukan suatu tes DNA merupakan jalan terbaik dan memudahkan dalam mengetahui nasab seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan *sirri* mengapa tidak dilakukan hal tersebut. Terlebih dengan teknologi yang semakin maju dan

¹⁸ Pdf, Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

¹⁹ A.Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015), hlm. 58.

ilmu pengetahuan kedokteran semakin maju secara pesat memudahkan sesuatu hal yang tidak bisa manusia jangkau, namun dengan ilmu pengetahuan kedokteran segala sesuatu bisa dilakukan.

Dari kasus yang telah penulis tulis di atas menyimpulkan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan *sirri* atau perkawinan yang tidak sah secara hukum, bisa mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan kerabat ayahnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu seperti melakukan tes DNA.

Menurut Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili ada 3 (tiga) metode yang digunakan untuk menentukan nasab seorang anak. yaitu *pertama*, pernikahan sah ataupun *fasid* (rusak), *kedua*, pengakuan garis nasab atau keturunan, *ketiga*, pembuktian²⁰

Pertama, pernikahan yang sah dan pernikahan yang rusak merupakan salah satu sebab penentu garis nasab keturunan. Secara praktiknya, garis keturunan ditentukan setelah terjadi suatu perkawinan, walaupun pernikahan yang dilakukan merupakan pernikahan yang *fasid*, atau nikah *urfi*.²¹

Kedua, pengakuan garis nasab atau keturunan, untuk metode yang kedua ini ada dua macam, pengakuan untuk dirinya dan pengakuan untuk orang lain. Pengakuan untuk dirinya bahwa seorang ayah mengakui bahwa anak tersebut memang anaknya. Pengakuan ini tetap sah meskipun sang ayah berada di ambang kematian, namun terdapat empat syarat pengakuan yang telah disepakati oleh Madzhab. Yaitu, (1) anak yang diakui nasabnya belum mengetahui nasabnya., (2) kenyataan membenarkan pengakuannya, maksudnya

²⁰ Wahbah A-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Addilatuhu Jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 38.

²¹ Nikah urfi, yaitu akad nikah yang dilakukan tanpa adanya bukti nikah di catatan sipil.

bahwa usia dari anak yang diakui sebagai nasabnya usia dari anak tersebut masuk akal untuk menjadi anaknya., (3) pengakuan dari orang yang diakui sebagai nasabnya mudah dipercaya., (4) tidak membebankan nasab pada orang lain. Kemudian pengakuan untuk orang lain, maksud dari pengakuan orang lain adalah pengakuan dari kerabat dari ayah kandung dari anak yang diakui nasabnya.

Ketiga, pembuktian merupakan metode yang dapat dilakukan untuk bisa dijadikan penentu nasab dengan mendengarkan kesaksian baik itu melihat langsung ataupun mendengarkan dari orang lain dengan menghadirkan kesaksian dari dua orang laki-laki atau dua orang perempuan.

Penulis menyimpulkan bahwa semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dan juga 3 (tiga) metode yang jelaskan oleh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya, bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah secara hukum negara atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, bisa mendapatkan hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan kerabat ayahnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan metode yang telah penulis sampaikan diatas, dan pejabat yang berwenang dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap bukti-bukti tersebut.²²

²² Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB XII Pasal 55 *juncto* Kompilasi Hukum Islam Bab XIV Pasal 103.

B. Analisis pendapat Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Alasan Pemberian Nafkah Anak Hasil Dari Perkawinan Sirri di Desa Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen

1. Sebab Alasan Perkawinan

Nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus ditanggung oleh orang tua dari seorang anak. nafkah yang harus diberikan kepada seorang anak adalah berupa biaya pemeliharaan, biaya kebutuhan pokok, biaya pendidikan, dan segala kebutuhan yang diperlukan oleh sang anak dan juga orang tua berkewajiban menjaga dan memelihara anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Kewajiban-kewajiban tersebut berlaku sampai sang anak dewasa atau menikah dan atau melakukan perkawinan.²³

Menurut Undang- Undang Perkawinan perkawinan yang sah apabila dilaksanakan menurut agama atau kepercayaan masing-masing,²⁴ apabila telah terjadi suatu ijab-qobul yang diikrarkan oleh mempelai laki-laki dan wali dari seorang mempelai perempuan. Dari akad tersebutlah timbul suatu hak dan kewajiban seorang suami dan isteri. Terutama kewajiban seorang suami untuk memenuhi nafkah lahiriyah dan batiniyah. Dalam hal apabila dari perkawinan tersebut lahir seorang anak, sang ayah berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan oleh sang anak, seperti yang telah penulis sampaikan di bab sebelumnya.

²³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB X Pasal 45 ayat 2.

²⁴ Lihat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan BAB I Pasal 2 ayat 1 .

Pemberian nafkah terhadap anak yang terjadi di Desa Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dari 4 informan yang penulis temui berbeda-beda. Pemberian nafkah merupakan suatu kewajiban seorang suami dan ayah, hal tersebut timbul karena suatu akad perkawinan. Berbeda dengan kasus yang dialami informan yang bernama bu Endang, perkawinan *sirri* yang dilakukannya bersama suaminya bapak Mulyadi. Akad nikah yang diucapkan oleh sang suami di depan kiyai dan 2 (dua) orang saksi menjadikan dia sebagai suami dan ayah dari anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut malah menjadikan sang suami tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan ayah.²⁵ Karena sebab perkawinan yang mereka lakukan adalah *sirri* yang mana tidak memiliki kekuatan hukum adalah penyebab tidak dilaksanakannya kewajiban pemberian nafkah terhadap isteri dan terutama kepada anaknya. Bahwa kewajiban yang paling terpenting dan utama yang harus dilakukan adalah pemenuhan nafkah terhadap isteri dan anak-anaknya dari perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah diatur oleh undang-undang dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat.

26

²⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Endang, pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017, pukul 15.00 di Desa Argopeni Rt.02 Rw.04 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

²⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Sujadi, pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017, pukul 19.00 di Desa Argopeni Rt.02 Rw.03 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

Dengan kita sebagai warga negara yang taat akan hukum dan aturan yang berlaku, itu berarti suatu bentuk ketaatan kita terhadap *ulil amri*. Firman Allah dalam Surah An-Nisa [4] ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى
اَلْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۚ اِنْ
كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*²⁷

Ayat diatas secara jelas bahwa konsep ketaatan terhadap undang-undang merupakan produk *ulil amri* yang bersifat mutlak, yang mana tergantung isi dari suatu pasal yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan juga hadits. Apabila suatu peraturan yang dibuat oleh *ulil amri* dan bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadits, maka tidak ada kewajiban kepada kita untuk menaati peraturan tersebut. Seperti halnya perkawinan *sirri* yang informan penulis temui, mereka melakukan perkawinan tersebut tanpa memikirkan sebab dan akibatnya. Padahal tersebut sangat bertentangan dengan norma hukum yang berlaku di negara Indonesia.

²⁷ QS. An-Nisa [4] : 59, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penerjema/Penafsir Al-Qur'an:1971), hlm. 125.

Analisis mengenai perkawinan *sirri* menurut penulis bahwa perkawinan *sirri* merupakan suatu penghalang dari pemberian nafkah terhadap isteri dan anak. Namun penulis mencoba meluruskan kesalahpahaman masyarakat terhadap anggapan bahwa perkawinan *sirri* adalah penyebab seorang suami atau ayah dapat menghirup udara bebas tanpa memikirkan kewajiban memenuhi nafkah atas isteri dan anaknya dari perkawinan *sirri*.

Selanjutnya terhadap perkawinan *sirri* merupakan suatu penghalang dari pemberian nafkah. Adalah anggapan yang salah adanya. Seperti yang telah penulis sampaikan diatas mengenai permohonan uji materiil yang diajukan oleh bu Machica, dari permohonan yang diajukan tersebut menghasilkan keputusan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang, bisa mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan kerabat ayahnya dengan ketentuan dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti DNA.²⁸ Sehingga dari keputusan Mahkamah Konstitusi ini menyebabkan seorang ayah secara hukum harus memberi nafkah terhadap anak biologisnya. Terlebih kepada anak yang dihasilkan dari perkawinan *sirri* atau perkawinan yang tidak dilakukan secara hukum negara sekalipun, namun dengan

²⁸ Pdf, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

ketentuan-ketentuan yang telah penulis sampaikan halaman sebelumnya.

Dengan begitu perkawinan *sirri* tersebut bukanlah suatu faktor penghalang atau alasan bagi seorang suami dan ayah untuk tidak melaksanakan kewajibannya memberi nafkah terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan *sirri*. Seharusnya sebagai orang tua yang baik, merupakan suatu keharusan memberi nafkah atau segala kebutuhan sang anak tanpa ia memikirkan anak tersebut lahir dari perkawinan yang tidak sah di hadapan hukum negara atau perkawinan yang tidak dicatatkan yang menyebabkan tidak memiliki kekuatan hukum. Dan hal itu menyebabkan tidak dilaksanakannya kewajiban memberi nafkah terhadap anaknya.

2. Sebab Alasan Ekonomi

Demi mewujudkan kebaikan dalam rumah tangga yang bahagia, semua itu tidak terlepas dari faktor biaya. Memang, materi bukanlah segalanya, namun demi terwujudnya keberlangsungan kehidupan suatu keluarga haruslah tercukupinya suatu kebutuhan dengan materi.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, bahwa sesuai dengan penghasilan seorang suami, dia berkewajiban untuk menanggung:

²⁹ Kompilasi Hukum Islam BAB XII, Pasal 80 ayat 4.

- a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi anak dan isteri;
- c) Biaya pendidikan bagi anak.

Nafkah sendiri menurut bahasa artinya ‘sesuatu yang diinfakkan oleh seseorang untuk keluarganya,’ sedangkan menurut syara’ nafkah adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal.³⁰

Dari beberapa permasalahan yang penulis temui di lapangan, seperti yang terjadi dalam perkawinan *sirri* Bapak Imam Wahyudi dan isterinya, karena pendapatan yang beliau dapat belum mencukupi kebutuhan sang isteri dan anak, keluarga dari bapak imam wahyudi berusaha membantu beliau memenuhi kebutuhan isteri dan anaknya.³¹ Diketahui bahwa bapak imam setiap bulannya memberikan nafkah terhadap isterinya sebesar 1 juta rupiah. Berdasarkan tabel 1 yang telah penulis paparkan bahwa bapak wahyudi belum bisa memberikan nafkah berupa materi sesuai dengan yang penulis paparkan diatas. Namun, bapak wahyudi menyadari bahwa apa yang beliau berikan belum bisa dikatakan cukup, maka untuk mencukupi kebutuhan isteri dan anaknya beliau dibantu oleh orang tuanya dan kerabatnya.³²

Suami adalah seorang laki-laki yang berperan sebagai kepala keluarga yang berkewajiban untuk bekerja dengan baik melalui

³⁰ Wahbah A-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Addilatuhu Jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 110.

³¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Imam Wahyudi, pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017, pukul 13.00 di Desa Argopeni Rt.03 Rw.03 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

³² Lihat, QS. Al-Baqarah [2]:233.

usaha yang baik dan halal. Seorang suami juga adalah pemimpin wanita dalam satu rumah tangga.

Seperti yang dijelaskan dalam Surah Al-Nisa ayat 43, bahwa kepemimpinan seorang laki-laki membawa tanggung jawab untuk dapat mencukupi biaya hidup isteri dan anak-anaknya sesuai dengan apa yang Allah SWT perintahkan dan sesuai dengan kemampuan Allah SWT berikan kepadanya. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau menikahkan putrinya Fatimah, beliau berkata kepada Ali r.a, *“engkau berkewajiban bekerja dan berusaha sedangkan dia berkewajiban mengurus rumah tangga.”* Ali r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah telah menyuruh Fatimah mengatur rumah tangga dan Ali bekerja ke luar rumah.³³ Suami yang baik harus mempunyai keyakinan bahwa segala pekerjaan dan usaha yang dilakukan itu adalah ibadah dan sebagai suatu ketaatan kepada Allah SWT. Bekerja bukan hanya merupakan suatu kreativitas.

Kemudian dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 juga menjelaskan bahwa kewajiban pemenuhan segala keperluan yang dibutuhkan oleh ibu dan yang dilahirkan sebab suatu perkawinan yang dilakukan secara agama Islam adalah dilakukan oleh ayah. Dan apabila seorang ayah tidak mampu memberikan nafkah guna pemenuhan segala kebutuhan sang anak karena suatu hal tertentu

³³ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: GEMA INSANI, 1998), hlm. 63.

yang menyebabkan seorang tidak dapat memberikan nafkah terhadap anaknya, dapat dilakukan oleh kerabat ayahnya. Suami bertanggung jawab mencari nafkah untuk isteri dan anak-anaknya sesuai dengan kebutuhan dan batas-batas kemampuannya.

Terhadap apabila seorang ayah atau suami tidak mampu dalam memenuhi kewajiban nya dalam memberikan nafkah terhadap isteri dan anak-anaknya sebab suatu hal tertentu kemudian digantikan oleh kerabatnya. Hal tersebut sepadan dengan prinsip bentuknya hukum Islam yaitu, menghilangkan kesulitan demi kemudahan umat Islam. Seperti dalam firman Allah Surah Al-Baqarah [2]:185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: "...Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..."³⁴

Kemudian apabila penulis kaitkan dengan *Qawaid Fiqhiyah* pemberian nafkah yang dilakukaoleh kerabat dari ayah atu suami.

Penulis kaitkan dengan salah satu dari lima kaidah yaitu المشقة

تجلب التيسر yang mempunyai arti bahwa kesukaran itu dapat menarik kemudahan.³⁵ Maksud dari kaidah diatas adalah suatu kesusahan mengharuskan adanya kemudahan. Bahwa suatu hukum yang mengandung kesusahan dalam pelaksanaannya, baik terhadap badan, jiwa maupun harta seorang *mukallaf*, dihilangkan sehingga

³⁴ QS. Al-Baqarah [2]:185, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penerjema/Penafsir Al-Qur'an:1971). hlm.

³⁵ A.Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015), hlm. 58.

tidak ada madharat lagi. Menurut penulis apabila seorang ayah atau suami yang tidak mampu dalam menjalankan kewajibannya memberikan nafkah terhadap isteri dan anak-anaknya karena sebab sakit dan tidak mampu untuk bekerja mencari penghasilan, untuk menggantikan kewajiban pemenuhan nafkah tersebut dapat dilakukan oleh kerabatnya.

Seperti yang dialami salah satu informan penulis bapak Syukuruddin, beliau tidak memberikan nafkah terhadap anaknya sebab beliau mengalami sakit stoke yang menyebabkan beliau tidak dapat berjalan dan tidak dapat melakukan aktivitasnya seperti biasa karena sakit yang beliau derita.³⁶ Dalam hal kasus yang dialami oleh informan yang penulis alami, seperti yang telah penulis jelaskan di atas bahwa apabila seorang ayah tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah dapat digantikan oleh kerabatnya. Penulis mencoba menguatkan pendapat tersebut dengan firman Allah dalam Surah Ath-Thalaaq [65]:7

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar)

³⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Syukuruddin, pada hari Jum’at, tanggal 28 April 2017, pukul 08.00 di Desa Argopeni Rt.03 Rw.03 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”³⁷

Potongan ayat diatas menjelaskan bahwa seorang laki-laki atau seorang ayah dan suami berkewajiban mencari nafkah dengan segenap kemampuannya. Seperti yang bapak Syukuruddin alami, beliau tidak member nafkah sebab tidak mampu mencari nafkah sebab sakit. Penulis beranggapan seharusnya kerabat dari bapak Syukuruddin membantu beliau dalam memenuhi kewajibannya memberi hak nafkah terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan *sirri* dengan isterinya. Terlebih apabila dalam pihak kerabat terdapat permasalahan pribadi, seharusnya kerabat atau keluarganya memikirkan dampak apabila tidak dipenuhinya nafkah kepada anak tersebut.

Kemudian dari permasalahan diatas, penulis mencoba mengkaitkan dengan 5 (lima) hal pokok terbentuknya syariat Islam, yaitu: 1). Agama (*Ad-Din*), 2). Jiwa (*Nafs*), 3). Akal (*Akl*), 4). Nasab (*Hifdzul nasl*), dan 5). Harta Kekayaan (*Mal*).³⁸ Agama Islam telah mensyariatkan berbagai hukum yang menjamin terwujudnya dan terbentuknya dari kelima hal diatas, guna menjamin pemeliharaan dan penjagaannya. Dalam hal pemberian nafkah terhadap anak hasil dari perkawinan *sirri* apabila ditinjau dari kelima hal diatas, salah satunya yang kedua yaitu jiwa (*nafs*)

³⁷ QS. Ath-Thlmaaq [65]:7, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penerjema/Penafsir Al-Qur'an:1971), hlm. 946.

³⁸ Prof. Abdul Wahhab Khlmlaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang : Dina Utama, 1994), hlm. 313-315.

bahwa untuk memelihara jiwa seorang muslim dan juga menjamin kehidupannya, agama Islam mensyariatkan kepada umatnya untuk memperoleh sesuatu guna mencukupi kehidupan mereka dengan beberapa hal seperti makanan, minuman, pakaian, juga tempat tinggal, menghindarkan diri dari bahaya, yang mengancam dirinya dan sebagainya. Apabila seorang anak yang belum dewasa, anak-anak yang dalam keadaan miskin atau tidak mempunyai harta dan belum mampu untuk bekerja tidak menerima hak-haknya dari orang tua, terlebih hak nafkah dari ayah kandungnya, bagaimana atau dari mana sang anak mendapatkan hak nafkah untuk memenuhi segala kebutuhannya dan jika bukan orang tua atau ayahnya siapa yang menjamin kehidupannya di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang.

Apabila seorang ayah tidak memberikan nafkah terhadap anak, hak-hak anak yang seharusnya diterima dari ayahnya akan hilang, seorang anak yang seharusnya di masa kecilnya ia mendapat kasih sayang dari orang tuanya, pemeliharaan yang baik, kebutuhan yang mencukupi, pendidikan akhlak yang baik dari orang tuanya, serta perlindungan dari orang tua nya hilang karena suatu kelalaian atau sebab tidak dipenuhinya kewajiban seorang ayah atau suami.

Seperti yang telah penulis jelaskan diatas bahwa suami atau seorang ayah berkewajiban untuk bekerja mencari uang guna

pemenuhan nafkah untuk anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Namun apabila dia tidak mampu dalam hal pemenuhan nafkah sebab sakit atau tidak mampu,³⁹ maka untuk kewajiban pemenuhan nafkah terhadap anaknya dapat digantikan atau dibantu oleh kerabatnya.⁴⁰

Kemudian dalam hal masa pemberian nafkah terhadap anak oleh seorang ayah, undang-undang sendiri tidak menyebutkan secara jelas dalam hal masa atau kapankah seorang anak harus menerima hak nafkahnya dari seorang ayah. Namun menurut Malikiyyah dan Hanafiyyah berpendapat bahwa waktu atau masa pemberian nafkah terhadap anak disesuaikan dengan keadaan ekonomi sang ayah, baik harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan.⁴¹

³⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Syukuruddin, pada hari Jum'at, tanggal 28 April 2017, pukul 08.00 di Desa Argopeni Rt.03 Rw.03 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Imam Wahyudi, pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017, pukul 13.00 di Desa Argopeni Rt.03 Rw.03 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

⁴¹ Wahbah A-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Addilatuhu Jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 122.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya terhadap pemberian nafkah terhadap anak hasil dari perkawinan *sirri* (studi kasus di Desa Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen), penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan *sirri* menurut hukum Islam adalah anak sah. Menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah ia yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Sedangkan perkawinan yang sah dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan masing-masing umat.
2. Akibat dari perkawinan *sirri* itu sendiri adalah pemberian nafkah terhadap isteri serta anak-anaknya. Terdapat dua sebab alasan pemberian nafkah yaitu sebab perkawinan dan sebab ekonomi. *Pertama*, perkawinan yang dilakukan secara *sirri* atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil, menyebabkan hilangnya hak dan kewajiban seorang ayah atau suami untuk memenuhi hak nafkah. Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 bahwa seorang anak yang

dilahirkan akibat dari perkawinan *sirri* dapat mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya dengan ketentuan dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti DNA. *Kedua*, alasan sebab ekonomi. Hukum Islam telah mengatur bahwa kewajiban nafkah adalah dilakun oleh ayah. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233 menyebutkan bahwa kewajiban nafkah dilakukan atau dipenuhi oleh seorang ayah. Hukum Islam tentunya tidak memberatkan seorang ayah apabila tidak mampu dalam memenuhi hak nafkah terhadap anak dapat dilakukan oleh kerabatnya. Kemudian di dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa kewajiban menelihara dan mendidik seorang anak sebelum dia dewasa atau kawin adalah kewajiban orang tua.

B. Saran

Setelah mengadakan penelitian dan analisis terhadap pemberian nafkah terhadap anak hasil dari perkawinan *sirri* (studi kasus di Desa Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen), maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyumbangkan saran-saran yang sekiranya bermanfaat bagi umat Islam pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya.

Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Taatilah setiap aturan yang telah dibuat oleh ulil amri atau pemerintah,
2. Menjauhlah dari perbuatan yang dapat mendekatkan kepada perbuatan zina.

3. Menikahlah sesuai dengan aturan hukum yang telah dibuat oleh negara.
4. Tunaikanlah kewajiban nafkah terhadap anak-anak yang telah dilahirkan.
5. Tidak ragu untuk mengajukan permohonan asal-usul anak ke pengadilan agama, demi hak-hak seorang anak.

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan kenikmatanyang tak terhingga kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga akhir. Meskipun dalam penyusunan tugas akhir ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam pembuatannya, namun penulis meyakini bahwa dlam penulisan karya ilmiah ini tidak terlepas dari kesalahan dan kekeliruan. Hal ini semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh sebabt itu, penulis sangat mengharapkan kritik yang konstruktif dan saran yang inovatif dari berbagai pihak demi perbaikan karya yang selanjutnya untuk mencapai kesempurnaan. Akhirya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca semuanya. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Al-Barry, Zakariya, 19976, *Hukum Anak-Anak Di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Ali, Zainuddin, 2007, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta Sinar Grafindo.
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta Gema Insani.
- Arikunto, Suharsii, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta
- Djubaidah, Neng, 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hasan Ayyub, Syaikh, 2008, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Husein, Muhammad, 2001, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LKis.
- Ihsan, A. Ghazali, 2015, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia.
- Imron, Ali, 2015, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Semarang: Karya Abadi Jaya.
- Khomsiana, Dina, 2017, *Akibat Hukum Istilhaq Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum positif*, Skripsi, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Koentjoroningrat, 1990, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Muhammad, Bahruddin, 2002, *Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan (Studi Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010)*, Semarang: Fatama Publishing.
- Nurul M, Irfan, 2015, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: AMZAH.
- Narbuko, Clolid dan abu Achmadi, 2010, *Metode Penelitian Bidang*, Jakarta: PT Bumi Angkasa
- Nazir, Moh, 1988, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Rizki Prasetya, Muh, 2010, *Hilangnya Hak-Hak Anak dan Istri Akibat Nikah Sirri*, Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Rofiq, Ahmad, 2013, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Santoso, Eko, 2012, *Kedudukan Anak Hasil Kawin Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia*, Skripsi, Surabaya: Universitas Wijaya Putra.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Metode Penelitian*, Jakarta: UI Perss.

Syahatah, Husein, 2004, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Jakarta: Gemas Insani.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Wahhab, Khallaf, Abdul, 1994, *Islmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama.

Wasian, Abdullah, 2010 *Akibat Hukum Perkawinan Sirri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak DAN Harta Kekayaan Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Tesis, Semarang: Universitas Diponegoro.

Wawancara dengan Bapak Muhammad, Kepala Kantor Urusa Agama Kecamatan Kebumen.

Wawancara dengan Bapak Johar, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen,.

Wawancara dengan Bapak Suprpto, Kepala Desa Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

Wawancara dengan Bapak Imam Wahyudi, Informan.

Wawancara dengan Bapak Syukuruddin, Informan.

Wawancara dengan Bapak Sujadi, Informan.

Wawancara dengan Ibu Endang, Informan.

Wawancara dengan Bapak Mulyadi, Informan.

Wawancara dengan Ibu Fitriani, Informan.

Wawancara dengan Ibu Parsilah, Informan.

Wawancara dengan Ibu Fatimah, Informan.

Wawancara dengan Dinda, Informan.

Wawancara dengan Manda, Informan.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Lembaga/Aparatur

1. seberapa persentase masyarakat di wilayah Kecamatan Kebumen/Desa Argopeni yang melakukan perkawinan *sirri*?
2. Apakah terdapat peraturan khusus larangan terjadinya perkawinan *sirri*?
3. Apakah Petugas Pencatat Nikah telah memberikan sosialisasi atau himbauan terhadap perkawinan *sirri*?
4. Apakah yang melandasi dilakukannya perkawinan *sirri* ?
5. Terhadap perkawinan *sirri* yang telah dilakukan, apakah sang suami atau ayah melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah terhadap anaknya?
6. Terhadap suami atau ayah yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah terhadap anaknya, apa alasan mereka ?
7. Menurut bapak/ibu bagaimana status atau kedudukan anak yang terlahir dari perkawinan *sirri* ?
8. Apakah terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, masi mempunyai hak yang sama seperti anak yang dilahirkan dari perkawinan pada umumnya ?
9. Apakah terhadap hak dan kewajiban yang hilang? Terhadap hak nafkah, siapa yang berkewajiban memberikan kepada anak, terlebih perkawinan *sirri* atau perkawinan yang tidak dicatatkan ?

B. Informan

1. Berapa usia perkawinan *sirri* yang anda lakukan?
2. Dimana anda melangsungkan perkawinan tersebut?
3. Siap yang menyaksikan perkawinan tersebut?
4. Apakah diketahui oleh kerabat dekat anda?
5. Mengapa, perkawinan yang anda lakukan disembunyikan?
6. Anda sudah memiliki anak? Berapa?
7. Bagaimana pemenuhan nafkah terhadapnya anak anda?
8. Jika anda tidak memberikan, kemudian siapa yang mencukupi kebutuhan anak anda?
9. Apa pekerjaan anda?
10. Berapa penghasilan anda dalam satu bulan?
11. Dengan penghasilan sebesar itu, apakah kurang untuk memenuhi kebutuhan anak anda?
12. Berapa besar kebutuhan (hak nafkah) yang anda berikan kepada anak dan isteri ?
13. Kapanakah anda memberikan nafkah tersebut kepada anak dan isteri ?



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
(BAP3DA)**

Jl. Veteran No. 2 Telp/Fax. (0287) 381570, Kebumen - 54311

Nomor : 071 - 1 / 189 / 2017

Kebumen, 25 April 2017

Lampiran : -

Hal : Izin Penelitian

Kepada:

Yth. Kepala Desa Argopeni Kec. Kebumen
Kab. Kebumen

di

Tempat

Merindaklanjuti surat rekomendasi Bupati Kebumen nomor 072 / Q / 2017 tanggal 25 April 2017 tentang Izin Penelitian/ Survey, maka dengan ini diberitahukan bahwa pada Instansi/ wilayah Saudara akan dilaksanakan penelitian oleh :

1. Nama / NIM : DWI FIFI FERANTI/ 132111011
2. Pekerjaan : Mahasiswa UIN WALISONGO Semarang
3. Alamat : RT 001 RW 003 DESA ARGOPENI KEC. KEBUMEN KAB. KEBUMEN
4. Penanggung Jawab : SAHIDIN
5. Judul Penelitian : PEMBERIAN NAFKAH TERHADAP ANAK HASIL DARI PERKAWINAN SIRRI (STUDI KASUS DI DESA ARGOPENI KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN)
6. Waktu : 25 April 2017 s/d 25 Juli 2017

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan survey/ penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Setelah survey/ penelitian selesai diharuskan melaporkan hasil-hasilnya kepada BAP3DA Kabupaten Kebumen.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

A.n. KEPALA BAP3DA KABUPATEN KEBUMEN
KABID LITBANG


REKTI HIDAYAT, SE
Pembina
NIP. 19630715 199303 1 002

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Camat Kebumen;
2. Yang Bersangkutan;



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KEBUMEN
KEPALA DESA ARGOPENI
Jl. Prtokol RT.05/01 Argopeni Telp081802809734 Kebumen Kode pos 54351

SURAT KETERANGAN

Nomor: 145 / 126 / 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Argopeni Kec.Kebumen Kab.Kebumen, menerangkan bahwa:

Nama : Dwi Fifi Feranti

Tempat, Tanggal Lahir: Kebumen, 25 Desember 1994

NIM : 132111011

Fakultas : Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian (Research) di Desa Argopeni Kec.Kebumen Kab.Kebumen, terhitung sejak tanggal 25 April sampai 25 Juni 2017 guna penulisan skripsi dengan judul **"PEMBERIAN NAFKAH TERHADAP ANAK HASIL DARI NIKAH SIRRI (STUDI KASUS DI DESA ARGOPENI KEC.KEBUMEN KAB.KEBUMEN)"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untu dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 25 Juni 2017

KEPALA DESA ARGOPENI

Kebumen, Kab.Kebumen



SUPRPTO

NIP:

Kebumen, 27 April 2017

Yth.

Bapak/Ibu Reponden

Di Tempat

Assalamu 'alaikum. W.r. Wb

Dengan hormat.

Saya mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsbiyyah) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Nama : Dwi Fifi Feranti

NIM :132111011

Bernaksud akan melaksanakan penelitian tentang "Pemberian Nafkah Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Sirri (Studi Kasus Di Desa Argopeni Kec Kebumen Kab.Kebumen).

Adapun segala informasi yang Bapak/Ibu berikan akan dijamin kerahasiaannya dan saya bertanggung jawab apabila informasi yang diberikan merugikan Bapak/Ibu, maka dari itu Bapak/Ibu tidak perlu mencantumkan nama atau identitas lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak/Ibu setuju untuk ikut serta dalam penelitian ini dimohon untuk menandatangani kolom yang telah disediakan.

Atas kesediaan dan kerjasannya saya mengucapkan terima kasih.

Responden

Peneliti


(.....)

Dwi Fifi Feranti

(132111011)

Kebumen, 27 April 2017

Yth.

Bapak/Ibu Reponden

Di Tempat

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb

Dengan hormat.

Saya mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyiyah) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang:

Nama : Dwi Fifi Feranti

NIM : 132111011

Bermaksud akan melaksanakan penelitian tentang "Pemberian Nafkah Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Sirri (Studi Kasus Di Desa Argopeni Kec. Kebumen Kab. Kebumen).

Adapun segala informasi yang Bapak/Ibu berikan akan dijamin kerahasiaannya dan saya bertanggung jawab apabila informasi yang diberikan merugikan Bapak/Ibu, maka dari itu Bapak/Ibu tidak perlu mencantumkan nama atau identitas lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak/Ibu setuju untuk ikut serta dalam penelitian ini dimohon untuk menandatangani kolom yang telah disediakan.

Atas kesediaan dan kerjasamanya saya mengucapkan terima kasih.

Responden


(.....)

Peneliti


Dwi Fifi Feranti

(132111011)

Kebumen, 27 April 2017

Yth.

Bapak/Ibu Reponden

Di Tempat

Assalamu 'alaikum, Wr, Wb

Dengan hormat.

Saya mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakshiyah) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang:

Nama : Dwi Fifi Feranti

NIM :132111011

Bermaksud akan melaksanakan penelitian tentang "Pemberian Nafkah Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Sirri (Studi Kasus Di Desa Argopeni Kec. Kebumen Kab.Kebumen).

Adapun segala informasi yang Bapak/Ibu berikan akan dijamin kerahasiaannya dan saya bertanggung jawab apabila informasi yang diberikan merugikan Bapak/Ibu, maka dari itu Bapak/Ibu tidak perlu mencantumkan nama atau identitas lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak/Ibu setuju untuk ikut serta dalam penelitian ini dimohon untuk menandatangani kolom yang telah disediakan.

Atas kesediaan dan kerjasamanya saya mengucapkan terima kasih.

Responden



Peneliti

Dwi Fifi Feranti

(132111011)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dwi Fifi Feranti
Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 25 Desember 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Argopeni Rt.01 Rw.03 Kec.Kebumen Kab.
Kebumen
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
No.HP : 089662873047
Email :Dwiveranti@yahoo.co.id

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 1 Argopeni Kebumen, lulus tahun 2007
2. SMP Islam Al-Kahfi Somalangu Kebumen, lulus tahun 2010
3. MAN 2 Kebumen, lulus tahun 2013

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 25 Desember 2017

Penyusun

Dwi Fifi Feranti
132111011